



**PUTUSAN**

**Nomor : 260 / Pdt.G / 2014 / PN.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ADE CHAIRANI NUR SAFITRI , Warga Negara Indonesia, Umur 41 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di 23 beech Hill Avenue, Hadleywood, herts, EN4 Olw, Lomdom , Inggris, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : Nyoman Gede Antaguna, SE.SH.MH dan Yohanes Simon Trombine, SH keduanya Advokat dan Konsultan Hukum di ACS Law Office, beralamat di Jalan Merthanadi No.88 A Kuta, badung, bertindak berdasarkan kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** :

MELAWAN :

1. **MUHAMMAD WIMAN WIBISANA, SH.MH** , pekerjaan Advokat, berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ASA Law Office " di Jalan Tjok Agung Tresna No.48 Renon, Denpasar , yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-
2. **AGUS SAMIJAYA,SH.MH**, pekerjaan Advokat, berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ASA Law Office " di Jalan Tjok Agung Tresna No.48 Renon, Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IKA NEDY WAHYUDI , SH** , pekerjaan Advokat, berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ASA Law Office “ di Jalan Tjok Agung Tresna No.48 Renon, Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT III;-**

4. **BAMBANG WALUYO JATI, SH** pekerjaan Advokat, berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ASA Law Office “ di Jalan Tjok Agung Tresna No.48 Renon, Denpasar,, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT IV;-**

**Atau Keempatnya disebut sebagai : PARA TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI DENPASAR ;

Telah memeriksa, membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

**Tentang Duduk Perkara;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 April 2014 terdaftar dalam register perkara Nomor : 260/Pdt.G/2014/PN.DPS yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi dan sekaligus sebagai pendiri PT. Buahana pada tanggal 7 November 2013 telah mengajukan gugatan perdata sebagai Penggugat yang terdaftar dengan nomor perkara: 733/PDT.G/2013/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut sebagai “**Perkara Perdata**”) melawan PT. Bali Resort & Leisure sebagai Tergugat;

2. Bahwa Para Tergugat adalah kuasa hukum yang mewakili PT. Bali Resort & Leisure dalam Perkara Perdata tersebut di atas;
1. Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan 154 RBG serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata tersebut pada tanggal 21 Januari 2014 memerintahkan para pihak dalam Perkara Perdata tersebut untuk melakukan proses mediasi dan berdasarkan permintaan para pihak dalam Perkara Perdata, Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata menunjuk Hakim Cening Budiana, SH sebagai mediator untuk Perkara Perdata tersebut;
2. Bahwa setelah penunjukan mediator tersebut proses mediasi dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak dalam Perkara Perdata tersebut;
3. Bahwa dalam proses mediasi tersebut hakim mediator meminta penggugat dalam Perkara Perdata tersebut untuk menyampaikan konsep perdamaian yang bisa ditawarkan kepada pihak tergugat dalam Perkara Perdata tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 Ade Chairani Nur Safitri mengirimkan surat konsep perdamaian kepada para kuasa hukumnya dan selanjutnya pada sidang mediasi ke-2 (kedua) yakni pada tanggal 28 Januari 2014, oleh kuasa hukum penggugat dalam Perkara Perdata surat konsep perdamaian tersebut dibacakan di hadapan para pihak dan hakim mediator, yang selanjutnya kuasa hukum tergugat dalam Perkara Perdata meminta waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari untuk memberikan tanggapan dengan sebelumnya

mendiskusikan konsep perdamaian tersebut dengan principal mereka;

Bahwa sebelum proses mediasi ditutup, kuasa hukum tergugat dalam Perkara

Perdata dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV yang hadir dalam mediasi

tersebut meminjam salinan surat konsep perdamaian tersebut untuk disalin di catatannya;

5. Bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada kesepakatan perdamaian di antara para pihak yang berperkara dalam Perkara Perdata tersebut, maka pada tanggal 11 Februari 2014 hakim mediator menyatakan mediasi atas Perkara Perdata tersebut gagal dan selanjutnya Perkara Perdata tersebut diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata tersebut.
6. Bahwa PT. Bali Resort & Leisure (atau disebut juga PT. Bali Resort & Leisure Company) mengajukan Perkara Injunction pada Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris yang terdaftar dengan Claim Number: 2014 Folio 139 sebagai penggugat melawan Ade Chairani Nur Safitri sebagai tergugat (selanjutnya disebut sebagai "**Perkara Injunction**").

Bahwa Perkara Injunction tersebut diajukan dengan dasar bahwa Ade Chairani Nur Safitri dianggap telah tidak menjalankan putusan Interim Award Arbitrase Singapura tertanggal 23 Desember 2013 yang isinya meminta Para Pihak khususnya Ade Chairani Nur Safitri untuk menunda jalannya Perkara Perdata (Perkara Nomor: 733/PDT.G/2013/PN.Dps) yang telah didaftarkan oleh Ade

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairani Nur Safitri pada tanggal 11 November 2013 di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sama sekali tidak mengenal menunda seluruh proses jalannya persidangan perkara perdata.

7. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Tergugat I (yang juga adalah kuasa hukum tergugat dalam Perkara Perdata) menggunakan Surat Konsep Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014 yang dibacakan dalam sidang mediasi pada tanggal 28 Januari 2014 sebagai alat bukti dalam persidangan Perkara Injunction di Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris dalam Witness Statemen Pertamanya yang mana Surat Konsep Perdamaian tersebut dijadikan lampiran Witness Statement Pertamanya dengan kode lampiran MWW1, Vol. 1, Tab 5.

8. Bahwa jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I di atas adalah merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yakni melanggar ketentuan hukum pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bunyinya:

**“Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain”**

9. Bahwa selain telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita 9 dan 10 di atas, Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yakni Tergugat I dalam Witness Statement Pertamanya tertanggal 11 Februari 2014 tersebut telah menyampaikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinamika yang terjadi selama proses mediasi Perkara Perdata tersebut secara tertulis kepada pihak lain yang dalam hal ini pengacara penggugat Perkara Injunction termasuk kepada Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris tanpa persetujuan atau izin para pihak dalam mediasi Perkara Perdata tersebut, yang mana hal tersebut adalah merupakan bentuk pelanggaran atas pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yang bunyinya: -----

**“Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diijinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak”**

10. Bahwa Tergugat II, III dan IV sebagai kuasa hukum dalam Perkara Perdata yang adalah advokat yang memiliki pengalaman praktek di pengadilan yang lama, sangat memahami hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia termasuk memahami dan memahami benar bahwa kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi yang gagal tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang bersangkutan dan perkara yang lain yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tersebut, namun Tergugat II, III dan Tergugat IV secara sengaja dan melawan hukum ikut berpartisipasi dengan melakukan pembiaran dan mendorong rekan mereka Tergugat I untuk mengajukan Surat Konsep



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014 yang ada dalam sebuah mediasi yang akhirnya gagal sebagai alat bukti dalam persidangan yang lain yakni sidang Perkara Injunction di Inggris;

11. Bahwa Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris telah mengeluarkan "Putusan Injunction" atas Perkara Injunction tersebut di atas pada tanggal 17 Maret 2014 yang pada intinya isinya putusannya memerintahkan Ade Chairani Nur Safitri membayar sebesar £ 35,000 (tiga puluh lima ribu poundsterling) kepada PT. Bali Resort & Leisure Company;

12. Bahwa "Putusan Injunction" Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court tersebut diputuskan dengan pertimbangan semata-mata berdasarkan pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 yakni Surat Konsep Perdamaian yang oleh Penggugat Perkara Injunction dianggap sebagai bentuk bahwa Ade Chairani Nur Safitri tidak mau melaksanakan putusan interim award arbitrase singapura;

13. Bahwa jelas akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat pada posita nomor 9 – 11 di atas yang mana kemudian "alat bukti" yang berdasarkan hukum tidak boleh dijadikan alat bukti tersebut malah dijadikan dasar pertimbangan hakim pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris untuk memutus Perkara Injunction adalah merugikan Penggugat baik secara material dan immaterial yakni sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berdasarkan Putusan Injunction tersebut Penggugat harus membayar uang sejumlah £ 35,000 (tiga puluh lima ribu poundsterling) kepada PT. Bali Resort & Leisure Company;
- ii. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah £ 2,000 (dua ribu pondsterling) kepada Pengacara di Inggris untuk mewakili Penggugat dalam Perkara Injunction;
- iii. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran jasa pembuatan Legal Opinion atas Perkara Injunction kepada AFS Law Office, firma hukum di Jakarta;
- iv. Penggugat harus meneluarkan uang sejumlah Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagai pembayaran jasa pembuatan Legal Opinion atas Perkara Injunction kepada ACS Law Office, firma hukum di Denpasar;
- v. Penggugat mengalami kerugian berupa meninggalkan pengerjaan proyek konsruksi di Inggirs karena harus bolak balik Indonesia – Inggris yang nilainya aalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- vi. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pesawat, transportasi dan akomodasi bolak-balik Indonesia – Inggris.

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian waktu dan pikiran yang mengganggu Pengugat. Bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lah yang utama bagi Penggugat, namun demikian Penggugat merasa perlu menilai kerugian imaterial yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah).

14. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat dalam gugatan dapat direalisasikan dan tuntutan ini tidak menjadi sia-sia atau sekedar ilusi, maka tidak berlebihan kiranya apabila Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan sita jaminan atas seluruh harta baik bergerak maupaun harta tidak bergerak milik Para Tergugat;

15. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar kerugian sebagaimana dimaksud angka 15 di atas harus dibayar sekaligus dan kontan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Bahwa oleh karena Penggugat ragu dengan itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajiban hukumnya secara sukarela kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi kewajiban hukumnya terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga dan meletakkan sita jaminan atas seluruh harta bergerak milik Para Tergugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan Surat Konsep Perdamaian yang muncul dalam proses mediasi Perkara Perdata Nomor: 733/PDT.G/2013/PN.Dps tertanggal 11 November 2013 yang gagal sebagai alat bukti dalam Perkara Injunction pada Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi Perkara Perdata Nomor: 733/PDT.G/2013/PN.Dps tertanggal 11 November 2013 secara tertulis kepada pihak lain yang dalam hal ini pengacara PT. Bali Resort & Leisure Company dalam Perkara Injunction di Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris termasuk kepada Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris tanpa persetujuan atau izin para pihak dalam mediasi Perkara Perdata Nomor: 733/PDT.G/2013/PN.Dps tertanggal 11 November 2013 adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Hukum Tergugat II, III dan Tergugat IV telah berpartisipasi dengan melakukan pembiaran dan mendorong rekan mereka Tergugat I untuk mengajukan Surat Konsep Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014 yang ada dalam sebuah mediasi yang akhirnya gagal sebagai alat bukti dalam persidangan yang lain yakni sidang Perkara Injunction di Inggris adalah perbuatan melawan hukum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yakni:

a. Kerugian Materiil:

- i. Berdasarkan Putusan Injunction tersebut Penggugat harus membayar uang sejumlah £ 35,000 (tiga pulu lima ribu poundsterling) kepada PT. Bali Resort & Leisure Company;
- ii. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah £ 2,000 (dua ribu pondsterling) kepada Pengacara di Inggris untuk mewakili Penggugat dalam Perkara Injunction;
- iii. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran jasa pembuatan Legal Opinion atas Perkara Injunction kepada AFS Law Office, firma hukum di Jakarta;
- iv. Penggugat harus meneluarkan uang sejumlah Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam pulu juta rupiah) sebagai pembayaran jasa pembuatan Legal Opinion atas Perkara Injunction kepada ACS Law Office, firma hukum di Denpasar; -----
- v. Penggugat mengalami kerugian berupa meninggalkan pengerjaan proyek konsruksi di Inggirs karena harus bolak balik Indonesia – Inggris yang nilainya adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- vi. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pesawat, transportasi dan akomodasi bolak-balik Indonesia – Inggris.

b. Kerugian Immateriil:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 1,00 (satu rupiah) sebagai ganti kerugian immaterial mengalami kerugian waktu dan pikiran yang mengganggu Pengugat. -

7. Menyatakan Sita Jaminan atas seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi kewajiban hukumnya terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya : NYOMAN GEDE ANTAGUNA, SE.SH.MH dan YOHANES SIMON ROMBINE, SH sesuai dengan surat kuasa tersebut diatas dan Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses Mediasi dengan menunjuk Sdr. Cening Budiana, SH., MH.- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Mediator, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menerangkan tetap pada dalil gugatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal pada tanggal 6 Agustus 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

## Jawaban Tergugat I

### I. DALAM KONVENSI.

#### **A. Dalam Eksepsi :**

##### **A.1. GUGATAN KURANG PIHAK**

1. Bahwa, jika dicermati secara seksama, maka pihak yang menjadi para Tergugat dalam perkara a quo adalah para advokat yang menjadi kuasa Hukum dari **PT. Bali Resort & Leisure Company** pada saat PT. Bali Resort & Leisure Company digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps. Demikian pula para advokat yang mewakili Penggugat dalam gugatan a quo juga merupakan para advokat yang mewakili para Penggugat dalam perkara tersebut sebagaimana juga didalilkan dalam gugatan Penggugat. Maka jika gugatan dimaksud ditujukan kepada para kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company dalam perkara tersebut karena didalihkan Penggugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum saat menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company, maka yang menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut bukan hanya para Tergugat saja melainkan masih Terdapat rekan **DEWA ALIT SUNARYA, SH.,** yang juga saat itu sah menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company. Sehingga tidak diikuti sertakanya rekan



DEWA ALIT SUNARYA, SH., sebagai Tergugat telah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak.

#### **A. 2. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS ( OBSCUUR LIBELLUM )**

1. Bahwa, kemudian jika kita cermati gugatan Penggugat lebih seksama lagi khususnya pada bagian Petitum gugatan Penggugat pada petitum angka **angka 2 ( kedua )** dinyatakan sebagai berikut :

***“ Menyatakan sah dan berharga dan meletakkan sita jaminan atas seluruh harta bergerak milik Para Tergugat “.***

Sedangkan didalam petitum **angka ke- 7 ( ketujuh )** dinyatakan :

***“ Menyatakan Sita Jaminan atas seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga “.***

Tentu diantara kedua isi Petitum tersebut sangat jauh berbeda isi, substansi maupun konsekuensi hukumnya. Karena kedua isi Petitum gugatan Penggugat tersebut tidak sinkron, tidak jelas, kabur dan membingungkan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat juga menjadi tidak jelas dan kabur ( **Obscuur Libellum** ).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

2. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, terkecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya secara tertulis.
3. Sebelum Tergugat menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu Tergugat sampaikan kepada majelis, sebenarnya perkara a



quo memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat dengan perkara yang terjadi sebelumnya yakni sengketa antara Penggugat dengan klien Tergugat **PT. Bali Resort & Leisure Company**. Dimana dalam perkara tersebut Penggugat diwakili oleh para kuasa hukumnya dalam perkara a quo dan **PT. Bali Resort & Leisure Company** yang saat itu berkedudukan sebagai Tergugat diwakili oleh Tergugat I dengan para Tergugat lainnya sebagai kuasa hukumnya. Perkara tersebut terregistrasi dengan perkara nomor : 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps.

4. Mohon perhatian majelis, klien para Tergugat tersebut memiliki manajemen yang berkantor pusat di London – Inggris. Sehingga seluruh korespondensi serta laporan dan komunikasi atas perkembangan dan dinamika yang terjadi didalam proses berjalanya perkara tersebut harus Tergugat sampaikan, laporkan dan komunikasikan ke kantor manajemen pusat di London – Inggris. Selain itu karena sengketa antara Penggugat dengan klien Tergugat I tersebut terjadi di tiga Pengadilan yakni di Pengadilan Arbitrase **The Singapore International Arbitration Centre ( SIAC )** Singapore, Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan di Inggris, adalah sesuatu yang sangat wajar apabila klien Tergugat I selalu mengkoordinasikannya seluruh perkembangan dan dinamika yang terjadi atas perkara yang sedang dihadapinya kepada para kuasa hukum yang menangani perkaranya pada masing-masing Pengadilan tersebut.
5. Bahwa sebagaimana didalihkan Penggugat dalam perkara a quo, para Tergugat digugat oleh Penggugat sehubungan dengan **kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai Advokat yang sedang menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban profesi Tergugat sebagai kuasa hukum**





*dari klien Tergugat didalam Perkara nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN.*

*Dps di Pengadilan Negeri Denpasar tersebut.*

6. Bahwa dalam perkara nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps tersebut klien Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat sedangkan Penggugat dalam perkara a quo juga berkedudukan sebagai Penggugat.
7. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps tersebut adalah adanya sengketa sewa menyewa tanah diantara Penggugat sebagai pihak yang menyewakan dengan klien Tergugat **PT. Bali Resort & Leisure Company** sebagai pihak Penyewa atas beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Banjar Susut, Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Gianyar sebagaimana tertuang dalam “ **Perjanjian Sewa “ tertanggal 30 April 2003.**
8. Bahwa salah satu klausul penting yang tertuang didalam “ Perjanjian Sewa tersebut “ dinyatakan bahwa apabila diantara Penggugat dengan klien Tergugat terjadi perselisihan atau sengketa yang bersumber dari adanya “ Perjanjian Sewa “ maka kedua belah pihak telah sepakat “ penyelesaiannya akan dilakukan di Lembaga Arbitrase Singapura atau dilembaga Arbitrase Internasional lainnya ( **vide : ketentuan pasal 14.1 Perjanjian Sewa** ) yang menurut ketentuan pasal 1 ayat ( 3 ) Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Perjanjian Sewa tersebut disebut juga dengan “ **Perjanjian Arbitrase “.**
9. Bahwa setelah Perjanjian Sewa berjalan selama 8 tahun, tiba-tiba pada tanggal 11 November 2013 dengan menggunakan sekelompok pria berbadan kekar yang jumlahnya tidak kurang dari 50 orang Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum telah mengambil alih paksa tempat usaha klien

Tergugat yang disewa klien Tergugat yang dikenal dengan “ Ubud Hanging Garden “ dan mengusir jajaran manajemen klien Tergugat.

10. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut dan berpedoman pada klausul Arbitrase yang tertuang didalam Perjanjian Sewa, kemudian klien Tergugat mengajukan gugatan ke Lembaga Arbitrase yang dikenal dengan **The Singapore International Arbitration Centre ( SIAC )** yang berkedudukan di **Singapura**.

11. Bahwa atas adanya gugatan dari klien Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun klien Tergugat sama sama telah menunjuk Arbiter dan Lembaga SIAC Singapura untuk memeriksa dan mengadili sengketa sewa menyewa tersebut. Dan sengketa tersebut sudah mulai diperiksa dan diadili oleh Lembaga Arbitrase SIAC.

12. Bahwa kemudian lembaga Arbitrase SIAC Singapura dalam persidangnya telah mengeluarkan “ **Putusan Sela** “ yang dikenal dengan putusan **Interim Awards** yang salah satu amar putusanya pada intinya berbunyi :  
**“ Melarang dan atau mencegah kepada para pihak khususnya Penggugat untuk tidak mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar sampai adanya putusan final atas perkara di Arbitrase Singapura “ .**

13. Namun meski sengketa antara Penggugat dan Klien Tergugat sudah diproses dan disidangkan di Arbitrase SIAC Singapura, ternyata Penggugat kembali mengajukan gugatannya di Pengadilan Indonesia in casu di Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa tentang adanya “ Putusan sela / putusan **interim awards** “ dari Lembaga Arbitrase SIAC Singapura tersebut, juga telah Tergugat I sampaikan baik kepada Penggugat, kepada Majelis hakim maupun kepada hakim Mediator yang memediasi perkara tersebut yang lengkap disertai dengan buki-buktinya dengan tujuan agar Penggugat mentaati isi amar putusan Lembaga Arbitrase SIAC yang telah ditunjuk dan disepakati bersama sebagai lembaga penyelesai sengketa diantara Penggugat dengan klien Tergugat dan mencabut gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar agar diperoleh adanya kepastian hukum dan tidak terjadinya dualisme putusan hukum.
15. Namun faktanya, Penggugat tetap tidak mentaati dan mengabaikan putusan sela ( **Interim awards** ) yang telah diputuskan Pengadilan Arbitrase SIAC Singapura tersebut dan tetap bersikukuh ingin melanjutkan perkara tersebut.
16. Bahwa selanjutnya, perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps. tersebut memasuki proses mediasi. Dalam proses mediasi tersebut, Tergugat kembali mengingatkan tentang adanya “ Putusan Sela “ dari Pengadilan Arbitrase SIAC di Singapura, agar ditaati oleh pihak-pihak khususnya oleh Penggugat.
17. Bahwa alih - alih Penggugat mau mentaati putusan sela Lembaga Arbitrase SIAC Singapura sebagai lembaga yang telah ditunjuk bersama dan mencabut gugatannya, Penggugat malah menyodorkan konsep surat perdamaian kepada para Tergugat untuk disampaikan kepada klien Tergugat di London-Inggris.
18. Bahwa para Tergugat sebagai kuasa hukum klien para Tergugat **PT. Bali Resort & Leisure Company** memiliki kewajiban menyampaikan seluruh



perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam setiap proses berjalanya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps sebagai laporan dari penerima kuasa kepada pemberi kuasa sebagaimana diwajibkan didalam kontrak kerja antara para Tergugat dengan klien para Tergugat, **PT. Bali Resort & Leisure Company**, diharuskan oleh kepatutan dan diperintah oleh Kode Etik maupun oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Terlebih terhadap konsep usulan perdamaian yang ditawarkan oleh Penggugat yang harus direspon oleh klien para Tergugat sebagai principal dalam perkara tersebut.

19. Bahwa, mengenai bentuk laporan yang diminta dibuat dalam bentuk surat Pernyataan sebagaimana diminta oleh klien Tergugat, hanyalah sekedar masalah teknis yang mungkin didasari oleh alasan agar klien para Tergugat mendapatkan laporan yang memiliki validitas dan kekuatan mengikat lebih tinggi ketimbang dibuat dalam bentuk surat biasa.
20. Sehingga apa yang Tergugat lakukan semata-mata hanya melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai penerima kuasa kepada Pemberi kuasa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat.
21. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan kepada majelis, bahwa pada akhirnya gugatan Perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps diputus dalam putusan Sela oleh **Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengabulkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari para Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang “ Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut “** dengan pertimbangan hukum majelis bahwa Perkara yang diajukan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi yurisdiksi Lembaga Arbitrase SIAC di Singapura yang saat itu sudah memproses, memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

22. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dan membantah dalih Penggugat yang mendalihkan bahwa “ Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum “ dikarenakan Tergugat dianggap telah “ **Menggunakan Surat Konsep Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014 sebagai alat bukti dalam persidangan Perkara Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris.** “ sehingga Tergugat I dianggap telah melanggar ketentuan pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa yurisdiksi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 hanya meliputi dan mengikat kepada Lembaga Pengadilan yang bernaung dibawah Mahkamah Agung di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak menjangkau dan mengikat terhadap yurisdiksi Pengadilan di Inggris.
- II. Bahwa apa yang Tergugat lakukan adalah merupakan salah satu bentuk korespondensi yang melaporkan tentang proses dan dinamika yang terjadi didalam proses mediasi perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps atas **permintaan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure Company** dan semata-mata merupakan kewajiban yang harus Tergugat lakukan dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat yang berada di London-Inggris sebagaimana diharuskan oleh Keputusan, Kode Etik, maupun Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Bahwa para Tergugat I sama sekali tidak terlibat dan bukan kuasa hukum didalam penanganan Perkara *Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*. Sehingga dalih Penggugat yang menuduh Tergugat I telah menggunakan surat konsep Perdamaian sebagai alat bukti di *Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris* adalah hanya bersifat asumsi, terlalu mengada-ada dan tanpa didasari fakta dan alasan hukum yang kuat.

**Pertanyaanya adalah**, bagaimana mungkin Tergugat menggunakan surat konsep perdamaian tersebut sebagai alat bukti *di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris* sementara Tergugat sendiri sama sekali tidak terlibat dan bukan kuasa hukum dalam penanganan perkara di Pengadilan Inggris tersebut.

IV. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat yang membuat laporan proses dan dinamika berjalanya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps dengan penuh itikad baik tidak terkecuali termasuk proses dan dinamika yang terjadi pada saat proses mediasi selain diwajibkan menurut kontrak kerja diantara Tergugat dengan klien Tergugat **PT. Bali Resort & Leisure Company**, juga diharuskan oleh **kepatutan dan kode etik Advokat**.

Selain itu perbuatan Tergugat menyampaikan dan menjelaskan proses dan dinamika perkara yang ditangani Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klien Tergugat juga dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan antara lain :

- **Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat**

**yang menegaskan:**

- **Pasal 16 :**

*“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar sidang Pengadilan “*

- **Pasal 17 :**

*Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 129 K/**

**Kr/1970/ anggal 10 Januari 1973** atau yang dikenal dengan **Yurisprudensi Yap Thiam Hien** dimana dalam kapasitasnya sebagai advokat penerima kuasa ( Yap Thiam Hien ) dengan terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan indakanya tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan kliennya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013

tanggal 14 Mei 2014 telah mengabulkan Permohonan Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :

***“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.***

- **The Basic Principle Role of Lawyers** sebagaimana diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan **termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.**
- **International Bars association Standards For The Independence of The legal Profesion.** Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan member nasehat kepada kliennya secara sah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Declaration of The World Conference of The Independence**

**of Justice Montreal**, Kanada tahun 1983 yang menuntut adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang menjamin Independensi advokat.

23. Dengan tegas Tergugat menolak dalih Penggugat yang mendalihkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dianggap telah melanggar ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yakni Tergugat dianggap telah “ *menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi perkara perdata tersebut secara tertulis kepada pihak lain yang dalam hal ini Pengacara Penggugat dalam Perkara Injunction termasuk kepada Pengadilan High Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris tanpa persetujuan atau ijin para pihak dalam mediasi perkara tersebut.* “ dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Perlu Tergugat I tegaskan bahwa proses dan dinamika yang terjadi dalam penanganan Perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps tak terkecuali proses dan dinamika yang terjadi dalam proses mediasi perkara tersebut hanya Tergugat sampaikan kepada Principal Klien Tergugat yakni **PT. Bali Resort & Leisure Company** di Inggris. Dan tidak pernah Tergugat publikasikan kepada khalayak ramai atau kepada public.. Andaipun Tergugat menyampaikannya melalui kuasa hukum **PT. Bali Resort & Leisure Company** yang di Inggris, secara prinsip maupun menurut hukum tidaklah dilarang karena secara prinsip pula kuasa hukum **PT. Bali**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Resort & Leisure Company** yang di Inggris bukan bertindak untuk diri pribadinya secara personal, melainkan bertindak mewakili klien kami di Inggris. Kuasa hukum Penggugat dalam gugatan di *Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris* memiliki otoritas, kapasitas dan legal standing bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT. Bali Resort & Leisure Company** di Inggris. Jadi secara substansial perbuatan kuasa hukum **PT. Bali Resort & Leisure Company** di Inggris sebagai wakil kliennya berhak menerima informasi apapun dari kuasa hukumnya di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Tergugat sebagai kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company di Indonesia berhak menerima seluruh informasi mengenai perkembangan dan dinamika perkara klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure Company yang sedang berlangsung atau terjadi di Inggris sebagai bentuk koordinasi kerja tim kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company, dan semata-mata bukan demi kepentingan Tergugat secara personal / pribadi, melainkan semata-mata untuk kepentingan hukum dan pembelaan pihak principal **PT. Bali Resort & Leisure Company** yang Tergugat wakili.

- II. Bahwa yurisdiksi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 hanya meliputi pada Lembaga Pengadilan yang bernaung dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI di wilayah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Republik Indonesia dan tidak menjangkau dan mengikat terhadap yurisdiksi Pengadilan di Inggris.

III. Bahwa apa yang Tergugat lakukan adalah merupakan salah satu bentuk korespondensi yang melaporkan tentang proses dan dinamika yang terjadi didalam proses mediasi perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps atas permintaan klien Tergugat **PT. Bali Resort & Leisure Company** dan semata-mata merupakan kewajiban yang harus Tergugat lakukan dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat yang berada di London-Inggris sebagaimana diharuskan oleh Keputusan, Kode Etik, maupun Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

IV. Bahwa para Tergugat sama sekali tidak terlibat didalam penanganan Perkara *Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*. Sehingga dalih Penggugat yang menuduh para Tergugat telah “ menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi perkara perdata tersebut secara tertulis kepada pihak lain ” adalah tidak berdasar. Terlebih jika tuduhan yang menyatakan Tergugat telah menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi tersebut kepada *Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*. Bagaimana mungkin Tergugat dapat menyampaikan hal tersebut sementara Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sama sekali tidak terlibat sebagai kuasa hukum dalam penanganan perkara di Pengadilan Inggris tersebut.**

V. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat yang membuat laporan proses dan dinamika berjalanya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps dengan penuh itikad baik tidak terkecuali termasuk proses dan dinamika yang terjadi pada saat proses mediasi kepada klien Tergugat **PT. Bali Resort & Leisure Company**, selain diwajibkan oleh kepatutan, kode etik Advokat juga oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Selain itu perbuatan Tergugat melaporkan, menyampaikan dan menjelaskan proses dan dinamika perkara yang ditangani Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum kepada klien Tergugat juga mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan **antara lain :**

- **Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan:**
- **Pasal 16 :**

*“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar sidang Pengadilan “*



- **Pasal 17 :**

*“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.*

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 129 K/**

**Kr/1970/ anggal 10 Januari 1973** atau yang dikenal dengan **Yurisprudensi Yap Thiam Hien** dimana dalam kapasitasnya sebagai advokat penerima kuasa dengan terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan indakanya tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan kliennya.

- **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013**

tanggal 14 Mei 2014 telah mengabulkan Permohonan Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :

***“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya***



*dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien  
didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.*

- **The Basic Principle Role of Lawyers** sebagaimana diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan **termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.**
- **International Bars Association Standards For The Independence of The legal Profesion.** Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan member nasehat kepada klienya secara sah.
- **Declaration of The World Conference of The Independence of Justice Montreal,** Kanada tahun 1983 yang menuntut adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang menjamin Independensi advokat.

24. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalih Penggugat yang mendalihkan adanya Putusan dari **Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris** yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan





Tergugat I. Namun fakanya disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat sendiri. Karena secara prinsip dan substansial sebenarnya Putusan dari ***Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*** tersebut semata-mata dikarenakan oleh karena Tindakan dan perbuatan Penggugat sendiri yang melanggar dan tidak mentaati isi Putusan Sela atau Putusan Interim Awards dari Pengadilan Arbitrase SIAC Singapura. Putusan Interim Awards dari SIAC Singapura tersebut telah dilanggar oleh Penggugat dengan tetap mengajukan dan melanjutkan gugatannya di Pengadilan Indonesia in casu Pengadilan Negeri Denpasar dan tidak mencabutnya. Dan pelanggaran terhadap putusan pengadilan Arbitrase SIAC Singapura tersebut berdasarkan hukum di Negara Inggris dimungkinkan untuk diajukannya tuntutan atau gugatan kerugian terhadap pihak si pelanggar. Sehingga dalih Penggugat yang menyalahkan Tergugat atas dijatuhkannya putusan dalam perkara ***Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*** adalah dalih yang sangat tendensius dan sama sekali tidak berdasar secara hukum.

25. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak adanya tuntutan ganti rugi, dwangsom maupun permohonan sita dari Penggugat sebagaimana dialihkan Penggugat. Selain tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dijatuhkannya putusan perkara ***Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*** semata-mata bukan dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat namun semata-mata jusru dikarenakan oleh “ Perbuatan Melawan Hukum “ yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yakni



tidak ditaati dan dilanggarnya “ **PUTUSAN SELA ATAU PUTUSAN INTERIM AWARDS DARI PENGADILAN ARBITRASE THE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE ( SIAC ) OLEH PENGGUGAT.**

## **II. DALAM REKONVENSI**

1. Perlu Penggugat tegaskan apa yang penggugat uraikan pada bagian konvensi merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi melakukan gugatan Perdata disertai tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I atas tuduhan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum padahal apa yang Penggugat perbuat dan lakukan semata-mata dilandasi oleh itikad baik dalam melakukan pembelaan terhadap klien Penggugat serta dalam kapasitas dan kedudukan Penggugat sebagai advokat yang sedang menjalankan profesi Tergugat sebagai advokat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan :

- **Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan:**
- **Pasal 16 :**



*“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar sidang Pengadilan “*

- **Pasal 17 :**

*“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.*

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 129 K/ Kr/1970/ anggal 10 Januari 1973** atau yang dikenal dengan **Yurisprudensi Yap Thiam Hien** dimana dalam kapasitasnya sebagai advokat penerima kuasa dengan terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan indakanya tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan kliennya.
- **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013** tanggal **14 Mei 2014** telah mengabulkan Permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :

***“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.***

- **The Basic Principle Role of Lawyers** sebagaimana diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan **termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.**
- **International Bars Association Standards For The Independence of The legal Profesion.** Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan member nasehat kepada klienya secara sah.
- **Declaration of The World Conference of The Independence of Justice Montreal,** Kanada tahun 1983 yang menuntut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang menjamin Independensi advokat.

- **Putusan Sela atau Putusan Interim awards Lembaga Arbitrase The Singapore International Arbitration Centre ( SIAC )**

1. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil kepada Penggugat. Yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil dapat penggugat rinci sebagai berikut :

- Biaya Penggugat dalam setiap kali bersidang a . Rp. 1000.000,- x 15 kali persidangan = Rp.15.000.000,- .
- Biaya pulang pergi Denpasar-Singapura untuk membahas masalah ini dengan Pengacara yang menangani gugatan klien Penggugat di Singapura serta mengajukan permohonan dokumen-dokumen terkait perkara a quo sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )

b) Kerugian Imateriil dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

- Dapat merugikan Penggugat karena dalam menjalankan profesi Penggugat, penggugat dihantui perasaan khawatir, takut akan adanya tuntutan hukum atau gugatan ganti rugi sehingga Penggugat merasa tidak leluasa dan independen lagi dalam menjalankan profesi Tergugat I sebagai advokat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilangnya waktu Tergugat karena harus menghadiri persidangan maupun menyusun konsep jawab menjawab sebagai akibat adanya gugatan a quo, padahal jika tidak ada gugatan a quo Penggugat bisa melakukan aktifitas pekerjaan lainnya.
- Dalam kapasitas dan Kedudukan Penggugat sebagai Pengurus Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia ( KAI ) Denpasar yang menjabat Sekretaris, nama baikPengguga merasa dicemarkan karena Penggugat telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Meskipun kerugian Imateriil sangat sulit untuk dapat dinilai dengan uang, namun jika mau dihitung maka kerugian Imateriil Penggugat yang penggugat alami kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah )

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat berjumlah **Rp.**

**5. 65.000.000,- ( lima milyar enam puluh lima juta rupiah ).**

23. Bahwa mengingat kerugian yang diderita Penggugat tersebut cukup besar maka Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut wajib dibayar Tergugat secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 20 ( dua puluh ) hari sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat memiliki nilai dan berharga, maka untuk menjamin pembayaran ganti rugi tersebut dapat dilaksanakan oleh Tergugat jika tuntutan ganti rugi Penggugat dikabulkan Majelis, maka kami memohon agar majelis melakukan Sita Jaminan ( conservatoir beslaag ) terhadap beberapa bidang tanah yakni :

- a) Sebidang tanah hak milik No. 1103 / Desa Buahan, seluas 26.800 M<sup>2</sup> ( dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, Surat Ukur tanggal 24 – 6 – 2000 Nomor 40 / 2000, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )
- b) Sebidang tanah hak milik No. 1088 / Desa Buahan, seluas 5.655 M<sup>2</sup> ( lima ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, Surat Ukur tanggal 24 – 8 – 2000 Nomor 41 / 2000, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )
- c) Sebidang tanah hak milik No. 1087 / Desa Buahan, seluas 700 M<sup>2</sup> ( tujuh ratus meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, Surat Ukur tanggal 15 – 5 – 2001 Nomor 67 / 2001, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar,  
Propinsi Bali. ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )

bangunan yang didirikan diatas diatas ketiga bidang tanah  
tersebut diatas dahulu dikenal dengan nama “ UBUD  
HANGING GARDENS “ dan sekarang dikenal dengan nama “  
HANGING GARDENS UBUD “.

- d) Sebidang tanah hak milik No. 1195 / Desa Buahan, seluas  
750 M2 ( tujuh ratus lima puluh meter persegi ) beserta  
bangunan yang berdiri diatasnya, tertera atas nama Ade  
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan, Kecamatan  
Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. ( batas –batas  
tanah akan diajukan menyusul )
- e) Sebidang tanah hak milik No. 3783 / Desa Ungasan, seluas  
7500 M2 ( tujuh ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas  
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,  
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.  
( batas –batas tanah akan diajukan menyusul );
- f) Sebidang tanah hak milik No. 5272 / Desa Ungasan, seluas  
5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade  
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta  
Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas –batas  
tanah akan diajukan menyusul )
- g) Sebidang tanah hak milik No.3196 / Desa Ungasan, seluas  
8700 M2 ( delapan ribu tujuh ratus meter persegi ), tertera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,  
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )

- h) Sebidang tanah hak milik No.3199 / Desa Ungasan, seluas  
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama  
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan  
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas –batas  
tanah akan diajukan menyusul )
- i) Sebidang tanah hak milik No.3202 / Desa Ungasan, seluas  
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama  
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan  
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas –batas  
tanah akan diajukan menyusul )
- j) Sebidang tanah hak milik No.3773 / Desa Ungasan, seluas  
2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas  
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,  
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali  
( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )
- k) Sebidang tanah hak milik No.3784 / Desa Ungasan, seluas  
2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas  
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,  
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali  
( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) Sebidang tanah hak milik No.3785 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )
- m) Sebidang tanah hak milik No.3786 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )
- n) Sebidang tanah hak milik No.4026 / Desa Ungasan, seluas 4178 M2 ( empat ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )
- o) Sebidang tanah hak milik No.5273 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )
- p) Sebidang tanah hak milik No.0955 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas –batas  
tanah akan diajukan menyusul )

25. Bahwa, oleh karena Penggugat meragukan itikad baik Tergugat untuk dapat melaksanakan kewajiban hukumnya atas putusan yang dijatuhkan majelis yang berkekuatan hukum tetap, serta untuk mendesak Tergugat agar melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) atas setiap keterlambatan pembayaran dan atau kelalayan pemenuhan kewajiban hukumnya terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis hakim dalam perkara ini mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menggugat Penggugat dengan disertai tuntutan pembayaran ganti rugi pada saat Penggugat I menjalankan kewajiban profesinya sebagai advokat dengan itikad baik bagi kepentingan hukum dan pembelaan klienya adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Kerugian Materiil sebesar Rp.65 000.000,- ( enam puluh lima jua rupiah)
  - b) Kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah )
  - c) Sehingga kerugian seluruhnya berjumlah Rp. 5.65.000.000,- ( lima milyar enam puluh lima juta rupiah )
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir beslaag ) terhadap :
  - a) Sebidang tanah hak milik No. 1103 / Desa Buahon, seluas 26.800 M2 ( dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi ) beserta bangunan yang didirikan diatasnya, Surat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 24 – 6 – 2000 Nomor 40 / 2000, tertera atas  
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buah,  
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali

b) Sebidang tanah hak milik No. 1088 / Desa Buah, seluas  
5.655 M2 ( lima ribu enam ratus lima puluh lima meter  
persegi ) beserta bangunan yang didirikan diatasnya, Surat  
Ukur tanggal 24 – 8 – 2000 Nomor 41 / 2000, tertera atas  
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buah,  
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

c) Sebidang tanah hak milik No. 1087 / Desa Buah, seluas  
700 M2 ( tujuh ratus meter persegi ) beserta bangunan yang  
didirikan diatasnya, Surat Ukur tanggal 15 – 5 – 2001  
Nomor 67 / 2001, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri,  
terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten  
Gianyar, Propinsi Bali.

Bangunan-bangunan yang berdiri diatas ketiga bidang tanah  
huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas dahulu dikenal dengan  
nama “ UBUD HANGING GARDENS “ dan sekarang dikenal  
dengan nama “ HANGING GARDENS UBUD “

.....€\*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

..e!.....

U\*PG.20120208123649\_3b4a46d1c97a186ee85ac0f99ea9eded\_315-

CGGV-08.rtf,glqnBF...U\*~?

20120208123649\_3b4a46d1c97a186ee85ac0f99ea9eded\_315-CGGV-08.rtf

€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.\_e!

`..†U\*TI.20120417120440\_4d3a5ae50c0fad5d4fca2845b33f0f37\_848-09-

GV

(f).rtf.x0Qag0†U\*\*A20120417120440\_4d3a5ae50c0fad5d4fca2845b33f0f3

7\_848-09-GV

(f).rtf€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.\_e!...U\*PG.20120503143243\_835d49b99841eae1f3cd274f26fcdd2d\_521-

CtlV-07.rtf.Q3DxXkU\*~?

20120503143243\_835d49b99841eae1f3cd274f26fcdd2d\_521-CtlV-07.rtf

€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

..!`^U\*TI.20120512093933\_727a9aaf803ae9ec499a6bfa29436de9\_451-

CtlV-2010.rtf,vesOHF^U\*\*A20120512093933\_727a9aaf803ae9ec499a6bfa

29436de9\_451-CtlV-2010.rtf

€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.\_!...%

U\*PF.20120301151045\_99f05afe4925cafc2f6151bba9f2b56a\_180-07-

GTH.rtf.cNqdw0%

U\*>20120301151045\_99f05afe4925cafc2f6151bba9f2b56a\_180-07-

GTH.rtf!€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q!...ŠU\*PG.20111205160254\_61ed649f2a0e9dbbd9e96411a85c17fd\_022-

CtlH-10.rtf.HPNloŠU\*~?

20111205160254\_61ed649f2a0e9dbbd9e96411a85c17fd\_022-CtlH-10.rtfŠ

€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q!..6U\*PG.20111204181102\_8deb73088fbc33dcce624345263f91d5\_748-

CtlV-08.rtf.arvvNy6U\*~?

20111204181102\_8deb73088fbc33dcce624345263f91d5\_748-

CtlV-08.rtf€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..e!..δU\*PG.20120515113213\_9a3dfd26b52c399f84dd3a2b144cfda6\_092-

CtlV-07.rtf.7igJE1δU\*~?

20120515113213\_9a3dfd26b52c399f84dd3a2b144cfda6\_092-CtlV-07.rtfCE

€\*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.\_e!..õU\*PG.20120207141805\_84591e417b3a802f5e3f7b1520a0f5fa\_285-

CGGV-09.rtf.SFLByuõU\*~?

20120207141805\_84591e417b3a802f5e3f7b1520a0f5fa\_285-CGGV-09.rtf

€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q!..öU\*PE.20120417090036\_16544bfa04ab4ba0dd916a445a521fa9\_729-0

8-

GH.rtf.plzlBXöU\*=20120417090036\_16544bfa04ab4ba0dd916a445a521f

a9\_729-08-GH.rtfŽ€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.\_e!

`..÷U\*TI.20111205091733\_e6c07c0704cbd16d53c17a1ac453db8a\_934-09-

GTH-

C2.rtf.Yu5RIq÷U\*\*A20111205091733\_e6c07c0704cbd16d53c17a1ac453d

b8a\_934-09-GTH-C2.rtf€\*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.\_e!

`..øU\*TI.20111208083238\_cafcaef94c1ef13e32c0ec666fabe768\_886-09-

GTH-

C2.rtf.F6r9STøU\*\*A20111208083238\_cafcaef94c1ef13e32c0ec666fabe76

8\_886-09-GTH-C2.rtf€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.\_e!

d..ùU\*XM.20120326104120\_340f72d48c3f7905b7dc6730e27abe17\_474-0

4-GTH-

Syiqoq.rtf.Aeji5mùU\*E20120326104120\_340f72d48c3f7905b7dc6730e27

abe17\_474-04-GTH-Syiqoq.rtf'€\*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..!..úU\*PG.20120404102430\_2aa70d844f5f8ae165afc1e648220368\_694-

ctlh-07.rtf.HNnZjQúU\*~?

20120404102430\_2aa70d844f5f8ae165afc1e648220368\_694-

ctlh-07.rtfensi Yap Thiam Hien dimana dalam kapasitasnya sebagai advokat penerima kuasa dengan terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan tindakannya tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan klienya.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013 tanggal 14 Mei 2014 telah mengabulkan Permohonan Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal 16 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut menjadi :

***“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.***

- **The Basic Principle Role of Lawyers** sebagaimana diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan ***termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.***



- **International Bars Association Standards For The Independence of The legal Profesion.** Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan member nasehat kepada klienya secara sah.
- **Declaration of The World Conference of The Independence of Justice Montreal,** Kanada tahun 1983 yang menuntut adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang menjamin Independensi advokat.

5. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalih Penggugat yang mendalihkan adanya Putusan dari ***Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris*** yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II. Namun fakanya disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat sendiri. Karena secara prinsip dan substansial sebenarnya Putusan dari ***Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris*** tersebut semata-mata dikarenakan oleh karena Tindakan dan perbuatan *Penggugat sendiri yang melanggar dan tidak mentaati isi Putusan Sementara atau Putusan Interim Awards dari Pengadilan Arbitrase SIAC Singapura.* Putusan Interim Awards dari SIAC Singapura tersebut telah dilanggar oleh Penggugat dengan tetap mengajukan dan melanjutkan gugatannya di Pengadilan Indonesia in casu Pengadilan Negeri Denpasar dan tidak





mencabutnya. Dan pelanggaran terhadap putusan pengadilan Arbitrase SIAC Singapura tersebut berdasarkan hukum di Negara Inggris dimungkinkan untuk diajukannya tuntutan atau gugatan kerugian terhadap pihak si pelanggar. Sehingga dalih Penggugat yang menyalahkan Tergugat atas dijatuhkannya putusan dalam perkara ***Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*** adalah dalih yang sangat tendensius dan sama sekali tidak berdasar secara hukum.

6. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak adanya tuntutan ganti rugi, dwangsom maupun permohonan sita dari Penggugat sebagaimana didalihkan Penggugat. Selain tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dijatuhkannya putusan perkara ***Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*** semata-mata bukan dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat namun semata-mata justru dikarenakan oleh “ Perbuatan Melawan Hukum “ yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yakni tidak ditaati dan dilanggarnya “ **PUTUSAN SELA ATAU PUTUSAN INTERIM AWARDS DARI PENGADILAN ARBITRASE THE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE ( SIAC ) OLEH PENGUGAT.**

## II. DALAM REKONVENSI



1. Perlu Penggugat tegaskan apa yang penggugat uraikan pada bagian konvensi merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini.

1. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melakukan gugatan Perdata disertai tuntutan ganti rugi kepada Tergugat II atas tuduhan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum padahal apa yang Penggugat perbuat dan lakukan semata-mata dilandasi oleh itikad baik dalam melakukan pembelaan terhadap klien Penggugat serta dalam kapasitas dan kedudukan Penggugat sebagai advokat yang sedang menjalankan profesi Tergugat sebagai advokat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan :

- **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan:**

- **Pasal 16 :**

*“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar sidang Pengadilan “*

- **Pasal 17 :**

*“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi*



*pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.*

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 129 K/Kr/1970/ tanggal 10 Januari 1973** atau yang dikenal dengan **Yurisprudensi Yap Thiam Hien** dimana dalam kapasitasnya sebagai advokat penerima kuasa dengan terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan indakanya tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan kliennya.
- **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013 tanggal 14 Mei 2014** telah mengabulkan Permohonan Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :

***“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.***



- **The Basic Principle Role of Lawyers sebagaimana diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ),** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan **termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.**
- **International Bars Association Standards For The Independence of The legal Profesion.** Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan member nasehat kepada klienya secara sah.
- **Declaration of The World Conference of The Independence of Justice Montreal,** Kanada tahun 1983 yang menuntut adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang menjamin Independensi advokat.
- **Putusan Sela atau Putusan Interim awards Lembaga Arbirase The Singapore International Arbitraion Centre ( SIAC )**

2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil kepada Penggugat.

Yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut :



a). Kerugian Materiil dapat penggugat rinci sebagai berikut :

- Biaya Penggugat dalam setiap kali bersidang a . Rp. 1.000.000,- x 15 kali persidangan = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Biaya pulang pergi Denpasar - Singapura untuk membahas masalah ini dengan Pengacara yang menangani gugatan klien Penggugat di Singapura serta mengajukan permohonan dokumen-dokumen terkait perkara a quo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

b). Kerugian Imateriil dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

- Dapat merugikan Penggugat karena dalam menjalankan profesi Penggugat, penggugat dihantui perasaan khawatir, takut akan adanya tuntutan hukum atau gugatan ganti rugi sehingga Penggugat merasa tidak leluasa dan independen lagi dalam menjalankan profesi Tergugat II sebagai advokat.
- Hilangnya waktu Tergugat karena harus menghadiri persidangan maupun menyusun konsep jawab menjawab sebagai akibat adanya gugatan a quo, padahal jika tidak ada gugatan a quo Penggugat bisa melakukan aktifitas pekerjaan lainnya.
- Dalam kapasitas dan Kedudukan Penggugat sebagai Pengurus Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia ( KAI ) Denpasar yang menjabat Sekretaris, nama baik



Penggugat merasa dicemarkan karena Penguat telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Meskipun kerugian Imateriil sangat sulit untuk dapat dinilai dengan uang, namun jika mau dihitung maka kerugian Imateriil Penguat yang penguat alami kurang lebih sekitar Rp.5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penguat berjumlah **Rp.5.065.000.000,- ( lima milyar enam puluh lima juta rupiah ).**

23. Bahwa mengingat kerugian yang diderita Penguat tersebut cukup besar maka Penguat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penguat tersebut wajib dibayar Tergugat secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 20 ( dua puluh ) hari sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

24. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penguat memiliki nilai dan berharga, maka untuk menjamin pembayaran ganti rugi tersebut dapat dilaksanakan oleh Tergugat jika tuntutan ganti rugi Penguat dikabulkan Majelis, maka kami memohon agar majelis melakukan Sita Jaminan ( conservatoir beslaag ) terhadap beberapa bidang tanah yakni :

- a). Sebidang tanah hak milik No. 1103 / Desa Buah, seluas 26.800 M<sup>2</sup> ( dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri diatasnya, Surat Ukur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 – 6 – 2000 Nomor 40 / 2000, tertera atas nama

Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahon, Kecamatan

Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ( batas-batas

tanah akan diajukan menyusul )

b). Sebidang tanah hak milik No. 1088 / Desa Buahon, seluas

5.655 M2 ( lima ribu enam ratus lima puluh lima meter

persegi ) beserta bangunan yang berdiri diatasnya, Surat Ukur

tanggal 24 – 8 – 2000 Nomor 41 / 2000, tertera atas nama Ade

Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahon, Kecamatan

Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. ( batas-batas

tanah akan diajukan menyusul )

c). Sebidang tanah hak milik No. 1087 / Desa Buahon, seluas 700

M2 ( tujuh ratus meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri

diatasnya, Surat Ukur tanggal 15 – 5 – 2001 Nomor 67 /

2001, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di

Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar,

Propinsi Bali. ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

bangunan yang didirikan diatas diatas ketiga bidang tanah

tersebut diatas dahulu dikenal dengan nama “ UBUD

HANGING GARDENS “ dan sekarang dikenal dengan nama “

HANGING GARDENS UBUD “.

d). Sebidang tanah hak milik No. 1195 / Desa Buahon, seluas

750 M2 ( tujuh ratus lima puluh meter persegi ) beserta

bangunan yang berdiri diatasnya, tertera atas nama Ade

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

e). Sebidang tanah hak milik No. 3783 / Desa Ungasan, seluas 7500 M2 ( tujuh ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

f).Sebidang tanah hak milik No. 5272 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

g).Sebidang tanah hak milik No.3196 / Desa Ungasan, seluas 8700 M2 ( delapan ribu tujuh ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

h). Sebidang tanah hak milik No.3199 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i). Sebidang tanah hak milik No.3202 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )
- j).Sebidang tanah hak milik No.3773 / Desa Ungasan, seluas 2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )
- k).Sebidang tanah hak milik No.3784 / Desa Ungasan, seluas 2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )
- l).Sebidang tanah hak milik No.3785 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )
- m).Sebidang tanah hak milik No.3786 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

n).Sebidang tanah hak milik No.4026 / Desa Ungasan, seluas 4178 M2 ( empat ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

0). Sebidang tanah hak milik No.5273 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

p).Sebidang tanah hak milik No.0955 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

25. Bahwa, oleh karena Penggugat meragukan itikad baik Tergugat untuk dapat melaksanakan kewajiban hukumnya atas putusan yang dijatuhkan majelis yang berkekuatan hukum tetap, serta untuk mendesak Tergugat agar melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) atas setiap keterlambatan pembayaran dan atau kelamban pemenuhan kewajiban



hukumnya terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis hakim dalam perkara ini mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menggugat Penggugat dengan disertai tuntutan pembayaran ganti rugi pada saat Penggugat II menjalankan kewajiban profesinya sebagai advokat dengan itikad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi kepentingan hukum dan pembelaan klienya adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami

Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

d) Kerugian Materiil sebesar Rp. 65 000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah )

e) Kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah )

f) Sehingga kerugian seluruhnya berjumlah Rp. 5.065.000.000,- ( lima milyar enam puluh lima juta rupiah )

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir beslaag )

terhadap :

a). Sebidang tanah hak milik No. 1103 / Desa Buahon, seluas 26.800 M2 ( dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi ) beserta bangunan yang didirikan diatasnya, Surat Ukur tanggal 24 – 6 – 2000 Nomor 40 / 2000, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali

b).Sebidang tanah hak milik No. 1088 / Desa Buahon, seluas 5.655 M2 ( lima ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi ) beserta bangunan yang didirikan diatasnya, Surat Ukur tanggal 24 – 8 – 2000 Nomor 41 / 2000, tertera atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahon,  
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

c).Sebidang tanah hak milik No. 1087 / Desa Buahon, seluas 700  
M2 ( tujuh ratus meter persegi ) beserta bangunan yang  
didirikan diatasnya, Surat Ukur tanggal 15 – 5 – 2001 Nomor  
67 / 2001, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di  
Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar,  
Propinsi Bali.

Bangunan-bangunan yang berdiri diatas ketiga bidang tanah  
huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas dahulu dikenal dengan  
nama “ UBUD HANGING GARDENS “ dan sekarang dikenal  
dengan nama “ HANGING GARDENS UBUD “

d).Sebidang tanah hak milik No. 1195 / Desa Buahon, seluas  
750 M2 ( tujuh ratus lima puluh meter persegi ) beserta  
bangunan yang berdiri diatasnya, tertera atas nama Ade  
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahon, Kecamatan  
Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

e).Sebidang tanah hak milik No. 3783 / Desa Ungasan, seluas  
7500 M2 ( tujuh ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas  
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,  
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

f).Sebidang tanah hak milik No. 5272 / Desa Ungasan, seluas  
5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

g).Sebidang tanah hak milik No.3196 / Desa Ungasan, seluas 8700 M2 ( delapan ribu tujuh ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

h).Sebidang tanah hak milik No.3199 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

i).Sebidang tanah hak milik No.3202 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

J).Sebidang tanah hak milik No.3773 / Desa Ungasan, seluas 2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

k).Sebidang tanah hak milik No.3784 / Desa Ungasan, seluas 2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





l).Sebidang tanah hak milik No.3785 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

m).Sebidang tanah hak milik No.3786 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

n).Sebidang tanah hak milik No.4026 / Desa Ungasan, seluas 4178 M2 ( empat ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

o). Sebidang tanah hak milik No.5273 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

p).Sebidang tanah hak milik No.0955 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) setiap harinya atas keterlambatan pembayaran dan atau kelalaian



pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Penggugat  
terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi untuk  
membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang  
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

### **JAWABAN TERGUGAT III**

#### **I. DALAM KONPENSI.**

##### **A. Dalam Eksepsi :**

##### **A.1. GUGATAN KURANG PIHAK**

Bahwa, jika dicermati secara seksama, maka pihak yang menjadi para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah para Advokat yang menjadi Kuasa Hukum dari PT. Bali Resort & Leisure pada saat PT. Bali Resort & Leisure digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps. Demikian pula para advokat yang mewakili Penggugat dalam gugatan *a quo* juga merupakan para advokat yang mewakili para Penggugat dalam perkara tersebut sebagaimana juga didalilkan dalam gugatan Penggugat. Maka jika gugatan dimaksud ditujukan kepada para kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure dalam perkara tersebut karena didalihkan Penggugat dianggap telah melakukan



perbuatan melawan hukum saat menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure, maka yang menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut bukan hanya para Tergugat saja melainkan masih Terdapat rekan DEWA ALIT SUNARYA, SH., yang juga saat itu juga menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure. Sehingga tidak diikuti sertakannya rekan DEWA ALIT SUNARYA, SH., sebagai Tergugat telah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak.

#### **A. 2. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS ( *OBSCUR LIBELLUM* )**

Bahwa, kemudian jika kita cermati gugatan Penggugat lebih seksama lagi khususnya pada bagian Petitum gugatan Penggugat pada petitum angka angka 2 ( kedua ) dinyatakan sebagai berikut :

*“ Menyatakan sah dan berharga dan meletakkan sita jaminan atas seluruh harta bergerak milik Para Tergugat “.*

Sedangkan didalam petitum angka ke- 7 ( ketujuh ) dinyatakan :

*“ Menyatakan Sita Jaminan atas seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga “.*

Tentu diantara kedua isi Petitum tersebut sangat jauh berbeda isi, substansi maupun konsekuensi hukumnya. Karena kedua isi Petitum gugatan Penggugat tersebut tidak sinkron, tidak jelas, kabur dan membingungkan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat juga menjadi tidak jelas dan kabur ( *Obscur Libellum* ).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**



1. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, terkecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya secara tertulis.
2. Sebelum Tergugat menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu Tergugat sampaikan kepada majelis, sebenarnya perkara *a quo* memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat dengan perkara yang terjadi sebelumnya yakni sengketa antara Penggugat dengan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure. Dimana dalam perkara tersebut Penggugat diwakili oleh para kuasa hukumnya dalam perkara *a quo* dan PT. Bali Resort & Leisure yang saat itu berkedudukan sebagai Tergugat diwakili oleh Tergugat III dengan para Tergugat lainnya sebagai kuasa hukumnya. Perkara tersebut terregistrasi dengan perkara nomor : 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps.
3. Mohon perhatian majelis, klien para Tergugat tersebut memiliki manajemen yang berkantor pusat di London – Inggris. Sehingga seluruh korespondensi serta laporan dan komunikasi atas perkembangan dan dinamika yang terjadi didalam proses berjalannya perkara tersebut harus Tergugat sampaikan, laporkan dan komunikasikan ke kantor manajemen pusat di London – Inggris. Selain itu karena sengketa antara Penggugat dengan klien Tergugat III tersebut terjadi di tiga Pengadilan yakni di Pengadilan Arbitrase The Singapore International Arbitration Centre ( SIAC ) Singapore, Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan di Inggris, adalah sesuatu yang sangat wajar apabila



klien Tergugat III selalu mengkoordinasikanya seluruh perkembangan dan dinamika yang terjadi atas perkara yang sedang dihadapinya kepada para kuasa hukum yang menangani perkaranya pada masing-masing Pengadilan tersebut.

4. Bahwa sebagaimana didalihkan Penggugat dalam perkara *a quo*, para Tergugat digugat oleh Penggugat sehubungan dengan kapasitas dan kedudukan Para Tergugat sebagai Advokat yang sedang menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban profesi Tergugat sebagai kuasa hukum dari klien Tergugat didalam Perkara nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps di Pengadilan Negeri Denpasar tersebut.
5. Bahwa dalam perkara nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps tersebut klien Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat sedangkan Penggugat dalam perkara *a quo* juga berkedudukan sebagai Penggugat.
6. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps tersebut adalah adanya sengketa sewa menyewa tanah diantara Penggugat sebagai pihak yang menyewakan dengan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisurese bagai pihak Penyewa atas beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Banjar Susut, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Gianyar sebagaimana tertuang dalam “ Perjanjian Sewa “ tertanggal 30 April 2003.
7. Bahwa salah satu klausul penting yang tertuang didalam “ Perjanjian Sewa tersebut “ dinyatakan bahwa apabila diantara



Penggugat dengan klien Tergugat terjadi perselisihan atau sengketa yang bersumber dari adanya “ Perjanjian Sewa “ maka kedua belah pihak telah sepakat “ penyelesaiannya akan dilakukan di Lembaga Arbitrase Singapura atau dilembaga Arbitrase Internasional lainnya ( vide : ketentuan pasal 14.1 Perjanjian Sewa ) yang menurut ketentuan pasal 1 ayat ( 3 ) Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Perjanjian Sewa tersebut disebut juga dengan “ Perjanjian Arbitrase “.

8. Bahwa setelah Perjanjian Sewa berjalan selama 8 tahun, tiba-tiba pada tanggal 11 November 2013 dengan menggunakan sekelompok pria berbadan kekar yang jumlahnya tidak kurang dari 50 orang Penggugat secara melawan hukum telah mengambil alih paksa tempat usaha klien Tergugat yang disewa klien Tergugat yang dikenal dengan “ UBUD HANGING GARDEN “ dan mengusir jajaran manajemen klien Tergugat.
9. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut dan berpedoman pada klausul Arbitrase yang tertuang didalam Perjanjian Sewa, kemudian klien Tergugat mengajukan gugatan ke Lembaga Arbitrase yang dikenal dengan *The Singapore International Arbitration Centre* ( SIAC ) yang berkedudukan di Singapura.
10. Bahwa atas adanya gugatan dari klien Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun klien Tergugat sama sama telah menunjuk Arbiter dan Lembaga SIAC Singapura untuk memeriksa dan mengadili sengketa sewa menyewa tersebut. Dan sengketa



tersebut sudah mulai diperiksa dan diadili oleh Lembaga Arbitrase SIAC.

11. Bahwa kemudian lembaga Arbitrase SIAC Singapura dalam persidangannya telah mengeluarkan “ Putusan Sela “ yang dikenal dengan putusan *Interim Awards* yang salah satu amar putusannya pada intinya berbunyi :

“ Melarang dan atau mencegah kepada para pihak khususnya Penggugat untuk tidak mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar sampai adanya putusan final atas perkara di Arbitrase Singapura “ .

12. Namun meski sengketa antara Penggugat dan Klien Tergugat sudah diproses dan disidangkan di *Arbitrase SIAC Singapura*, ternyata Penggugat kembali mengajukan gugatannya di Pengadilan Indonesia *in casu* di Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps.

13. Bahwa tentang adanya “ Putusan sela / putusan Interim Awards “ dari Lembaga Arbitrase SIAC Singapura tersebut, juga telah Tergugat III sampaikan, dalam persidangan perkara tersebut yang lengkap disertai dengan buki-buktinya dengan tujuan agar Penggugat mentaati isi amar putusan Lembaga Arbitrase SIAC yang telah ditunjuk dan disepakati bersama sebagai lembaga penyelesaian sengketa diantara Penggugat dengan klien Tergugat dan mencabut gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar agar diperoleh adanya kepastian hukum dan tidak terjadinya dualisme putusan hukum.





14. Namun faktanya, Penggugat tetap tidak mentaati dan mengabaikan putusan sela ( *Interim Awards* ) yang telah diputuskan Pengadilan Arbitrase SIAC Singapura tersebut dan tetap bersikukuh ingin melanjutkan perkara tersebut.
15. Bahwa alih - alih Penggugat mau mentaati putusan sela Lembaga Arbitrase SIAC Singapura sebagai lembaga yang telah ditunjuk bersama dan mencabut gugatannya, Penggugat malah menyodorkan konsep surat perdamaian kepada Tergugat untuk disampaikan kepada klien Tergugat di London-Inggris.
16. Bahwa para Tergugat sebagai kuasa hukum klien para Tergugat PT. Bali Resort & Leisure memiliki kewajiban menyampaikan seluruh perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam setiap proses berjalannya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps sebagai laporan dari penerima kuasa kepada pemberi kuasa sebagaimana diwajibkan didalam kontrak kerja antara para Tergugat dengan klien para Tergugat, PT. Bali Resort & Leisure Company, diharuskan oleh kepatutan dan diperintah oleh Kode Etik maupun oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Terlebih terhadap konsep usulan perdamaian yang ditawarkan oleh Penggugat yang harus direspon oleh klien para Tergugat sebagai *principal* dalam perkara tersebut.
17. Bahwa apa yang Tergugat lakukan semata-mata hanya melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai penerima kuasa kepada Pemberi kuasa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat.





18. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan kepada majelis, bahwa pada akhirnya gugatan Perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps diputus dalam putusan Sela oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengabulkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari para Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang “Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut” dengan pertimbangan hukum majelis bahwa Perkara yang diajukan Penggugat sudah menjadi *yurisdiksi* Lembaga *Arbitrase* SIAC di Singapura yang saat itu sudah memproses, memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.
19. Bahwa dengan tegas Tergugat III menolak dan membantah dalih Penggugat yang mendalihkan bahwa “Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum” dikarenakan Tergugat III dianggap dengan “Sengaja ikut berpartisipasi dengan melakukan pembiaran dan mendorong Tergugat I untuk Mengajukan Surat Konsep Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014 sebagai alat bukti dalam persidangan Perkara *Injunction* di Pengadilan *Hight Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court* di Inggris.” sehingga Tergugat III dianggap telah melanggar ketentuan pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan alasan sebagai berikut :



- I. Bahwa yurisdiksi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 hanya meliputi dan mengikat kepada Lembaga Pengadilan yang bernaung dibawah Mahkamah Agung di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak menjangkau dan mengikat terhadap yurisdiksi Pengadilan di Inggris.
- II. Bahwa apa yang Tergugat III lakukan adalah merupakan salah satu bentuk korespondensi yang melaporkan tentang proses dan dinamika yang terjadi didalam proses mediasi perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps atas permintaan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure dan semata-mata merupakan kewajiban yang harus Tergugat lakukan dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat yang berada di London-Inggris sebagaimana diharuskan oleh Keputusan, Kode Etik, maupun Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
- III. **Bahwa para Tergugat/ Tergugat III sama sekali tidak terlibat dan bukan kuasa hukum di dalam penanganan Perkara *Injunction* di Pengadilan *Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court* di Inggris. Sehingga dalih Penggugat adalah hanya bersifat asumsi, terlalu mengada-ada dan tanpa didasari fakta dan alasan hukum yang kuat.**  
**Pertanyaanya adalah : bagaimana mungkin Tergugat menggunakan surat konsep perdamaian tersebut sebagai alat bukti di Pengadilan *Hight Court of Justice Queen's***



*Bench Division Commercial Court* di Inggris sementara

Tergugat sendiri sama sekali tidak terlibat dan bukan

Kuasa Hukum dalam penanganan perkara di Pengadilan

Inggris tersebut.

IV. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai Advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat yang membuat laporan proses dan dinamika berjalannya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps dengan penuh itikad baik tidak terkecuali termasuk proses dan dinamika yang terjadi pada saat proses mediasi selain diwajibkan menurut kontrak kerja diantara Tergugat dengan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure, juga diharuskan oleh kepatutan dan Kode Etik Advokat.

Selain itu perbuatan Tergugat menyampaikan dan menjelaskan proses dan dinamika perkara yang ditangani Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum kepada klien Tergugat juga dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan antara lain :

• **UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT YANG MENEGASKAN:**

• **PASAL 16 :**

**ADVOKAT TIDAK DAPAT DITUNTUT BAIK SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DENGAN ITIKAD BAIK UNTUK**



KEPENTINGAN PEMBELAAN KLIEN DIDALAM  
MAUPUN DILUAR SIDANG PENGADILAN .

• PASAL 17 :

DALAM MENJALANKAN PROFESINYA, ADVOKAT  
BERHAK MEMPEROLEH INFORMASI, DATA, DAN  
DOKUMEN LAINNYA BAIK DARI INSTANSI  
PEMERINTAH MAUPUN DARI PIHAK LAIN YANG  
BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN TERSEBUT  
YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMBELAAN  
KEPENTINGAN KLIENYA SESUAI DENGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

• YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 129

K/KR/1970/ ANGGAL 10 JANUARI 1973 ATAU YANG  
DIKENAL DENGAN YURISPRUDENSI YAP THIAM HIEN

DIMANA DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI ADVOKAT  
PENERIMA KUASA ( YAP THIAM HIEN ) DENGAN  
TERPAKSA MENGUNGKAP TERJADINYA HUBUNGAN  
INTIM ANTARA SAKSI PELAPOR DENGAN PENEGAK  
HUKUM, DAN ATAS TINDAKANNYA TERSEBUT YAP THIAM  
HIEN DITUNTUT PIDANA NAMUN KEMUDIAN DIBEBAHKAN  
OLEH MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN ALASAN  
TINDAKANNYA TERSEBUT DILAKUKAN DALAM RANGKA  
MEMBELA KEPENTINGAN KLIENNYA.



• **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 26 / PUU-**

**XI / 2013 TANGGAL 14 MEI 2014** TELAH MENGABULKAN PERMOHONAN YUDICIAL REVIEW ATAS PERMOHONAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN MAHKAMAH KONSTITUSI TELAH MELENGKAPI BUNYI KETENTUAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG ADVOKAT TERSEBUT MENJADI :

**“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.**

• **THE BASIC PRINCIPLE ROLE OF LAWYERS SEBAGAIMANA DIADOPSI OLEH KONGRES KEDELAPAN**

**PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ( PBB )**, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan **termasuk di dalamnya tuntutan secara hukum.**

• **INTERNATIONAL BARS ASSOCIATION STANDARDS FOR THE INDEPENDENCE OF THE LEGAL PROFESION.**

Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun perdata, tetapi juga administrative,



ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah.

- **DECLARATION OF THE WORLD CONFERENCE OF THE INDEPENDENCE OF JUSTICE MONTREAL**, Canada tahun 1983 yang menuntut adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang menjamin Independensi advokat.

20. Dengan tegas Tergugat III menolak dalih Penggugat yang mendalihkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dianggap telah melanggar ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yakni Tergugat dianggap telah “ *menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi perkara perdata tersebut secara tertulis kepada pihak lain yang dalam hal ini Pengacara Penggugat dalam Perkara Injunction termasuk kepada Pengadilan High Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris tanpa persetujuan atau ijin para pihak dalam mediasi perkara tersebut. “ dengan alasan-alasan sebagai berikut :*

- I. Perlu Tergugat III tegaskan bahwa proses dan dinamika yang terjadi dalam penanganan Perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps tak terkecuali proses dan dinamika yang terjadi dalam proses mediasi perkara tersebut hanya Tergugat sampaikan kepada *Principal* Klien Tergugat yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bali Resort & Leisure di Inggris. Dan tidak pernah Tergugat publikasikan kepada khalayak ramai atau kepada public.. Andaipun Tergugat menyampaikannya melalui kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure yang di Inggris, secara prinsip maupun menurut hukum tidaklah dilarang karena secara prinsip pula kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure yang di Inggris bukan bertindak untuk diri pribadinya secara personal, melainkan bertindak mewakili klien kami di Inggris. Kuasa hukum Penggugat dalam gugatan di *Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court* di Inggris memiliki otoritas, kapasitas dan *legal standing* bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bali Resort & Leisure di Inggris. Jadi secara substansial perbuatan kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure di Inggris sebagai wakil kliennya berhak menerima informasi apapun dari kuasa hukumnya di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Tergugat sebagai kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure di Indonesia berhak menerima seluruh informasi mengenai perkembangan dan dinamika perkara klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure yang sedang berlangsung atau terjadi di Inggris sebagai bentuk koordinasi kerja tim kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company, dan semata-mata bukan demi kepentingan Tergugat secara personal / pribadi, melainkan semata-mata untuk kepentingan hukum dan pembelaan pihak principal PT. Bali Resort & Leisure yang Tergugat wakili.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- II. Bahwa Yurisdiksi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 hanya meliputi pada Lembaga Pengadilan yang bernaung dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak menjangkau dan mengikat terhadap Yurisdiksi Pengadilan di Inggris.
- III. Bahwa apa yang Tergugat lakukan adalah merupakan salah satu bentuk korespondensi yang melaporkan tentang proses dan dinamika yang terjadi didalam proses mediasi perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps atas permintaan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure dan semata-mata merupakan kewajiban yang harus Tergugat lakukan dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat yang berada di London-Inggris sebagaimana diharuskan oleh Keputusan, Kode Etik, maupun Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
- IV. Bahwa para Tergugat sama sekali tidak terlibat didalam penanganan Perkara *Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*. Sehingga dalih Penggugat yang menuduh para Tergugat telah “ menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi perkara perdata tersebut secara tertulis kepada pihak lain “ adalah tidak berdasar. Terlebih jika tuduhan yang menyatakan Tergugat telah menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi tersebut kepada *Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial*





*Court di Inggris.* Bagaimana mungkin Tergugat dapat menyampaikan hal tersebut sementara Tergugat sama sekali tidak terlibat sebagai Kuasa Hukum dalam penanganan perkara di Pengadilan Inggris tersebut.

- V. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai Advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat yang membuat laporan proses dan dinamika berjalanya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps dengan penuh itikad baik tidak terkecuali termasuk proses dan dinamika yang terjadi pada saat proses mediasi kepada klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure, selain diwajibkan oleh kepututan, kode etik Advokat juga oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Selain itu perbuatan Tergugat melaporkan, menyampaikan dan menjelaskan proses dan dinamika perkara yang ditangani Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum kepada klien Tergugat juga mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan antara lain :

- **UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT YANG MENEGASKAN:**

- **PASAL 16 :**

“ ADVOKAT TIDAK DAPAT DITUNTUT BAIK SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DENGAN



ITIKAD BAIK UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAAN  
KLIEN DIDALAM MAUPUN DILUAR SIDANG  
PENGADILAN “

- **PASAL 17 :**

“DALAM MENJALANKAN PROFESINYA,  
ADVOKAT BERHAK MEMPEROLEH INFORMASI,  
DATA, DAN DOKUMEN LAINYA BAIK DARI  
INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN DARI PIHAK  
LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN  
TERSEBUT YANG DIPERLUKAN UNTUK  
PEMBELAAN KEPENTINGAN KLIENYA SESUAI  
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
“.

- **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 129**

**K/KR/1970/ ANGGAL 10 JANUARI 1973** atau yang dikenal  
dengan Yurisprudensi Yap Thiam Hien dimana dalam  
kapasitasnya sebagai advokat penerima kuasa dengan  
terpaksa mengungkapkan terjadinya hubungan intim antara saksi  
Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut  
Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan  
oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan indakanya tersebut  
dilakukan dalam rangka membela kepentingan kliennya.

- **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 26 / PUU-XI /  
2013 TANGGAL 14 MEI 2014** telah mengabulkan  
Permohonan *Yudicial Review* atas permohonan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :

**“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.**

- **THE BASIC PRINCIPLE ROLE OF LAWYERS**  
**SEBAGAIMANA DIADOPTSI OLEH KONGRES KEDELAPAN**  
**PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ( PBB )**, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan **termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.**
- **INTERNATIONAL BARS AS'€\***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.\_

¢!..ûU\*PG.20120523091237\_089c8f93b40c3c9893d698f2111

5a171\_152-CtIV-07.rtf.OsUTBjûU\*~?

20120523091237\_089c8f93b40c3c9893d698f21115a171\_152

-CtIV-07.rtf“€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PE.20120402094238\_fccee337ecbe5cf0bf6e49b4a3f2

155b\_588-07-

GH.rtf.JvxGZMüU\*=20120402094238\_fccee337ecbe5cf0bf6

e49b4a3f2155b\_588-07-GH.rtf”€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.\_

¢!..ýU\*PF.20120404102913\_0932ff31cb122caf49b1f8a5f2958

f8d\_616-06-

GTH.rtf.YtsWtgýU\*~>20120404102913\_0932ff31cb122caf49b

1f8a5f2958f8d\_616-06-GTH.rtf.€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PH.20120206144258\_d8446f6f0787eb99d8c0a8105ac

1b06d\_991-09-GV

(b).rtf.NYic1JpU\*\*@20120206144258\_d8446f6f0787eb99d8c

0a8105ac1b06d\_991-09-GV(b).rtf-€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

·—

¢!..ÿU\*PG.20120206150037\_d5d92af3ee11e2e93ec99cee5ac

a2d7c\_283-CtlV-09.rtf.wYWzBdÿU\*~?

20120206150037\_d5d92af3ee11e2e93ec99cee5aca2d7c\_283

-CtlV-09.rtf—€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.\_ç!

d..V\*XM.20120321111708\_05f37cfe00e748537104b9444cc06

ef4\_435-10-GH-

YULIANA.rtf.lpvMeHV\*E20120321111708\_05f37cfe00e74853

7104b9444cc06ef4\_435-10-GH-YULIANA.rtf~€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

·—

¢!..V\*PG.20120526143209\_fd087dce36e12371f93aa36098b3

d209\_032-CGGV-09.rtf.UsE6XaV\*~?

20120526143209\_fd087dce36e12371f93aa36098b3d209\_032

-CGGV-09.rtf™€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PG.20111126110037\_ac19b7a1effd9506ee64aed4221ff

673\_001-P-11-WA.rtf.p2l5KEV\*~?

20111126110037\_ac19b7a1effd9506ee64aed4221ff673\_001-

P-11-WA.rtf2€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.\_ç!

h..>U\*T.20120501095132\_9b40a3a49c3bdd8c88caf2fbc868f5

34\_053-2010-Penj.Wali-

TOLAK.rtf.G6wGYd>U\*ÇEL20120501095132\_9b40a3a49c3bd

d8c88caf2fbc868f534\_053-2010-Penj.Wali-TOLAK.rtf%

PDF-1.4%Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼ 0 obj<</Length 3 0 R/Filter/

FlateDecode>>streamxœÍZl<ì6³/Ã ò9Đ©'Ø†iï—ñ!·9

„Ü²@¼Kp~T<¤'e»çÁlh!«T\*Öö•Jcîvøûâ~Á

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



æi‡0‡ô>»pŽĂç\_‡z‡pă±ôúüüĖİyFYÆ&7ŸÇáy—

áûĀ‡÷β~z5örŠ`CE»üðôðø=?#—Ÿβ xy ù`æi!ó4LĬ3sf̣;0÷`ćıdf|

p¥næŽ?æ`id2<5fQd–XY žøØĖ‡æe\$³[ov²L₂²áĬ]/6?₣W∞o\$Ĭ|‰

„bæw5F³ø÷`²TMÜ4|XàQ~d“qòç°ö9-ZD°Y.Ā?ë«Çe‘Xçl‡,Ĭ.’?

à¶b•—96ó"ˆáĬ!`Ä¶iw

ÑêJG÷°\$¾"ĀžBüœT1‡Ø;ûKœ.ÁFfÇÄYÑøi\$ùs\$ó!qıuLtueÜ

%°.ĬLăĬ<žĖĀ`W¾Ú[!OT\$Ÿ»,ne,|

ĐŠ@–MB<K<fšÑ• .õ&.ŰŰNj!ŰG^%İÇi²:XĬ!½²ˆˆxû>Æ±s

jœY`ýná;êĬ[:e>ĀjèiÖ™BPwĀJĀÍY`PIĀ,Ĭy«¶ç

ıôvC²Pe„48LĖ²Ñür©!Ç–“ ywàQø«Đ(‡Y<û:ø~%·ìòÔ’ÆfD(–L!

íòr–¼

•Æİ\$İ(T`Đø=²vĬj...«ÒQoŰ`¾¼~=.ýâµ>fH9ÑÇ²|\*.Á¹%YkJVü”üo

£Ó.1gDy,Āv|šáбі«PCE<2jç\$×MI'ÇbOÈc—JœĐmòä`f`¹eŰ½3.

È[L‡ŰQ„óüC)çz‰WkăÆ®,WC®



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@0,İÑ—'9Áçý“øŽ'Ě\*gŪi®,c; ->

€Ræ²~'B@íÔ'Dfrl ""Š§-6...

1Œ3<Ç.y...I çpW\$µiŪeÍ«ÔKÚz€òcKCı%„ù3äŪ£V¥Đ=Iª

¿Ě,ÆĒn«\$pmaä¼ \$½JL´ •É\$ƒ"›^~ãŪâ™%Ăİ;Ô,píi5~U/

Rx| "©fŪ;@®Mm,ĂXˆvŪÆš9&%„”U“Š¾ÓăJ

„],oŪKsdŪvĂðéUøTéÑõSĂ©BØ;ªQªÁÈ¥İ‘0AİaÉ†#ĂZİe“...

İİăÊXìc5»Bµ[Ōă"tl æ©Ê]4'/¹.ˆñŌ,épifDX. |CB®|xc]¥óôÓŸ—

ò<PâĐ=İáÆ3 Ä

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

¥(Ã,¶>g

Â'¿Ñ4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mž]ð~g\_y½Eàì!>!ó=â,,³n¡E(-C²ÁŞò,3u[q›\$'Pú-

dW~áRfÃâ3ü~ÄøÑ@ÃaÈ†|<

Y?™ñ>,,H³                      ôì%o î""5¡%Ú€&MCX4ù÷.%o

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





øiŽ,,/U,9PtRì

(~ÅY=ojè 3ÉÁÓj~ñ\$6@Ã2`ÉÑä

éh"ôi-¥...G°,ÊÇ•"H¿IN0n@κπ'9áá°²\$E~%ôð©äI,,ÎÕ]

U@8¶L\$ç\$-Đžò´o7 âcNñÈ0,yÊ

óâm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



it

Á²—kcgî£ø)S¶ÿOf=°ÑôX³ÓL      äwë\$(t\$ ÎÉi\$Ÿ|äN²i'sÃfc

€t—Žāz°nB\$ÓìÙçøÉWUüÖ¥ãd-RõÉåZì8žaTûW×(Ú.Ášì\_uÀÝ

‘cæó´î\$ggC \_ù\$ÜéLR:Z÷©îEOýHvÜ”ÂĖÁ6Ô”—

æ|ûia«Ĭ\_e‘úÆ”½!š¾ÔöfÁ;#ßêxs›ÝŒŽ»«öTM^”©p5Ýá¾¼à°

žDîRŽŒ(ÖÜšKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

—•

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



€)UÜ%ÇJİ,¶?sY...\_\*®<oX¼\_+²æ%ãë:Ê²tiTâÈ±Ê”KB

€ìÖ`iVPÊØ½|â,₃xâ³ØJö!Tê -ÝÖÍfWz#¾U€

ºKd¥GâsF4âj§%VydAÊ¹ºÔXśáGq¾;ÆëŸ5Ü\$B«îÜòââ®ÆŽ

+®^ÜİİcÇ±¿øj—Æt~gCN°uÓw¹âÀ0Á—óŸ²9Amðs)

Ý6Ýö™!ðÛBiceN«...b6N>[cZ”fçòĐòŸšĚİGhYĐµ@ üoªÂ~...

1œÒ-@WiĚĚ\$hgä,,ÇÖĞŽİ5àìøº,²Wœm&İ`D.OŸİdxiŠÛ

%..Töx‘¼,‘šr®¥çGõTá||/ÉC”r-Ž\*4û0f÷ªæs³iàSEòÔhî&÷\g

±><ÆER± jðq

564&èÉê]s=“”ìp%..¹3[Ý#\*+pśÛ`¥¾Tİ¶¶¿ ©KÛR••¶ûP\*¹î¥ÈaÚè



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2oA`là|30¹-ÍÿYB-I,İş:êiÝd8GÅÈ3#ä³¹²®3SÊS[+ã]-IVÖç'p²ø

£âKÆºáiÄg÷ÿµgCl·'¶Ç~ß-Øs8+Æ0ŸpwD®«òÓ¹⁄lÑ'³⁄⁄.h[s!|

ÜÔfm6XÖE0í

E¹⁄²G7L\_™ÀZZjçoujr/ôBý 4Ÿ† P

ÛÀendstreamendobj3 0 obj2112endobj5 0 obj<</Length 6 0

R/Filter/FlateDecode>>streamxœµZK<#7³⁄4İ`ð9`GŸGK,ÁĐm¹-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ärĒ&C Éß%UIj«ga3¶§U\*!öü³dqÓ /ÿžÄlÉxp½2—âôîëé×ŸNÿä

±ðúö×Ēöþ .æä”¿ØÓú\$Ÿòòöþçö¬r½žâ«Ð° Â¿Ár...WÐ×³

OMúH& uE"Ůl>ˆTx<Zbq»2þþ—

iJ#ZHD` :žþzVùÀ™=È°eéðëÛcžÖÖ´q«Ãm¬y i+wÚ&0ˆWðågW

²pòLŸw"®¿¿ÿòòöþòŸÓ,"Q

‘×ûß3Po f³/4[½âu...L"Z¶a/Ê?@¶/r%°¬ü!%¬x"piH¹Z,,³ŠÁe>ÔÀ

[•p£ªb4...òJÇTFxÿŸŸŸçî" w3ŸöA”ÖéðßŠÍD²!•5¬Â [µë,,•%

TìNš¬ĩ™Pi6QMJEßKÜ9-l=ãY%°J\_&/P¶¶µøb¶ó•n#šq9É—ëXÔ

ŸÂâ™,mN‘O,,§SĒ...dÜÖ,ß[6¹bk““âmÚ(D¿ÜÂÐÓ“ÂXpøGÃ\_!í—

·Á)JüGYEg«·ÓŸ¬Ÿ,šM5ØPÇ\*Æ%°!Ð³Ó°ÂZ/”jOð±ª”þçúä±ÉTA(!

G,Õi¶~U²Zví/g©ÊÖn<é\$8IRÍÉ6PÂ1ðáÝD@Èi\$©ù6™’o(Ÿ

Òù`z

îJ.œÄWŽgÖiÆ×v?ÁPİs±tr¬Eh"Q¶2T†,ÒÜãÇ3ÇÔ¶ÔÂÀ

%°‘8%3§Ÿ™úHüŸĒÈ1´Fî[§Ý2ŠmtÊk±±•8ŸBÜðæĒ

””šëÜ®³¬W÷Êw#À!iWx©•6f~sð¹i:<Òúbõ 6%

”cèà¹×`ˆÄMCµ±1;n÷l9\$,L°Ç®Ē9aÔvTÜ;A»ŸHÆRg\$

[\*@½u´±Ý[t7yòÜØÚpÔ«GmêW/ªa€]ß’,lŽ%¬NuFpÖÖ’žŠ©\_âi

°»ñ5m@¶,,ãŸ8gv



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¢8BNTÆGi~QŽPjê‘£ü5n>^9sXfbÅ £-a

“ñy\*îBêŠÂ³âÙÆ¥‘°4xv’uâ1—

ž&¶ejYé#çê<¶<İÄûâLeT ¼iÜ“ø‘ŽÆ±ñ<‘ RüäÆñp†1

%rUc§İö2–Á”¶b

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



²hè!lĴ<5ŕ!æN5i²ÔŒgM%ˆœ2m©P•LÙ©iĐ

´Í^1/2hšLéiVIL§~S:8ÔÚç,,fJYYĐ±¹Æel©%.\$ññ§ŕŸñz&Êµ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







KU³⁄₄ā=pi1uòZ†c2³èVV#6ÇfĀ`SùìÙ¼•në.¾PÜ‘ĀÖáÈŠó`ç

8Êä"?'^á†LNÜfK†`°„â±.

Ā•ĀmQ"Ē“4>±g^>|ĀXÊ\$†\$ œF;1ă²⁄₄æ±gĒ„EĒÝ`Çç"ĀBç

zYÔß†Ü™Yá²á™÷ôrìN““icèŽY]

#ŠÖHäüfšbÊEQ”G2mÔ~ývZL;mÄÆê`ž/t`O`ā...BIĀ¶©

\$ì<:Jg5Y™CEXš³⁄₄è`ÀSs|ö(-)Ēf')icY5m³Ā2X\*„ª

“ÈJ,S|EVàŌĪ@¿db€gé4ŠŚí>f]žví,vóLᵐØ,sŌu`İĒ»±Ff(

ĀšŬ,û.Ç½&“Cè®»LkiŌí,Ü...?V+?Š’«\$€İSòt©|uŠmøÊŠ±¶||

û@ôP•8â`%Šx...æx,)<läô '>hj4ê¹⁄₄Sw<íK,,çŬİŸµ^2zĀ!

`SZéoi®,ÚhÉöèúBiÚx,”9SÚX¹⁄₄ÉÉ#ŬÓµ

šniCùŽLÈv8€«Àšy™r&»£uù\*™,±QœG`LSà<bāPÇç

Ø`úc††wŽZfĀm¹⁄₄! ±²žoiÓAŽkŽÚ]£”ô">ØC`nZpCæC+Ó£«!

\$økŬPƒœ¶4...Śíw„™³©ēĪ•€³⁄₄,4U"ĀeZŌà>"~žžśí.mGtª

Qö†ÚZĀXYŸuqᵐ“pâ”„,Œ—qE(Sëü;Œ;æE!X³⁄₄»C ĨŸÑ`g...

@ñ¹°Cly—†pŬŬv ĨJÉ6™xGL²€PAùR”~RÖ&^ô[ánŠ~³Ŭ&šŸ

¥`³⁄₄óöc½ö½;âxhÈB O9Ŭ™ °ÔØýš~A6]-P3YmÝµā7`Žçqj

\$- bckn»`İPwĪ ĨŬx)bĀ“Öy-.W®Pû<ŒĀ†µĒ~„â8<®8Z

+XfÇĪ,/" ,¿Am”1j`ööOöc%#çw)iĪlynÓ£||:êee-E ¶’ÆB>éêV`,ç

ÓYQó¿(öGÖç¥ßýE¶Ē6î@

7£ °È•°ð² >Ā<ÙÖýÔĒ\$"ĀUŬ£É °`@ăÖ®'ù|ĀÑ¥Ā«YJøŬEü!^Ē

ᵐw~j~ĒXVSAĪMôĒ©çœœ äàZ£~òĒ/

šyR®¹\_endstreamendobj6 0 obj2093endobj8 0 obj<=</Length

9 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxœĀZKă6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¾I'õ'@R½mA€L<9ô¶À=,zèè¡@÷Ò¿\_Rç\$êa;³»E v,J  
¤øüDGœâôïËß“~ÄÜLÖ[øöÚžÝôâ-éc¡¿â|¾üñòúp"¥>ÛiÑp<Oï  
¿N?>Ô\$Ôôpûç<\_]Oò"ô¾œ'ÒÁx-óU]ä\_.œ'~/Â^OP\_¤1/4ž“,^u¤  
— T S¤2âpÓsw'7ùšÉI^ (Žél,fkø%/Øë,Ñù^ø\$¥É3^ôžðW»IX  
sµ,,Ÿ'»Z'81J¡lõ—÷Ÿ^PP\_>5F±xWyÿs4f¡(¿6#W3|àý-êpÈPn  
£ÚiãZ'äJÐ¾PGhuØ/Ám•Gĩ%„µOÍ[4ºzPàæ@hlmPSúë>[ú•Z  
,¶æÀAw¥\_)Äº¥aã±s@ÃoEÄÉEÂ6-èj•F,<•L¥|°„†f•¶¼Ñ(†4-  
VØòìuj...@yÖœëË'òº9òvý-Åd¥ºâÔže"%„ni³¥ø|Ã^)^ãç  
qLù`Ð¼,£ºÈÉg^êlòKe4F¤“#Ø-ác.ÅJ¥t  
,>ûl'e©Á\$èánÚYf3mD»( Öj'@JylÉ„#í•ù>öB|<WÈ6  
\*ä'ŸœÊsCV£Êyuä'ë...g9ië...«b]¤~<'3-©lÈéx £'|Èœ  
[cžeeñnú~ëãÈÇÜlúÒTÁ>j')2K%„ð,"@ú-Ô'ë÷R†A%  
ÙYáÁÂHQ“W÷÷šxóø±MdüÃ%)%'Ø¤KN"eu%  
öC½WèBpÆEuð•6U`éuO2+SçØu£Vá'ç/% UBcâœ  
£\_Ç™5q“z¾F±½lJáluS¾4l'Op»%îØnd%„CÛÉ¥+Ÿ  
\$w±«+pê"6µ . \*1š”” £Ç9”[8†#WE£)^<œ'Ä•møšp|  
r.S¼|©®xÉlÄ~c °fÃ\$ÆÖgÓÔk•,ĩ™ñ

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

š²\$SáfA v±^væss1ÊË

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



û...mg,£PâßŠ?¥G

ëþòpžYM

¶Vò

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ËÖû&~ýDå5À:½WEwjÀç,•f3ªdBÜl<"%šžËýyîJ¬ yde1~¥¬

(Đ K1SxG¶žÃü5ûĭn%èU”M¬v]Aæúk€Á

,ô³`Õàfpèî2œPe÷ÔÃVvŽ"xiY¼J,G²MdAÙ~‘...Ã,Ñ9××3>C8ù

ùâdìkø,xL»\$!3úëi?®tiæÂi-üýîÃHGeÑ×§'B¶%î?ÉTi4l`[ùP]

læŋi±D's•é      £UO«Ü©,, ° Jí9CEÕM...@ëíÁå~ÆççFY,, \*£B®

ïÿTÚbj|3fñ¿µl²kÔùaiM–Šǎ[ÈÖ@

**rè** **†+çè,**

Ⓜ¥ž...GB-3x£~â3">Pæ" ^+^±|:SÅG"ĩ"Ė9N/FÙ¾?ÚÀ)lyÂ!

3P<sup>3/4</sup>=qšÒ ]—KÓ<ãt=ÕY.Ü,      o<sub>3</sub>BÓi«R®¤Š„,µ&I9‘K~zMÚ\$‡¤

¥Ÿ+.,sRIFêµ”cênÖedí—:¶^¤”é0èæð›lŁ‡;Üà3çİ†•¤

+3«fØÊMÁx'žPtàc Š

**=@Ä•(**

### Disclaimer



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

w-2š¼|/¼ôæâý%óK-õC;Íç/ó

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

è'->VÖ1±¼,Đ2o)ØdŠæ³Û`”ÀÓçoçáÁhESk5ç”

¡^Ök“EYŽoÖĩGF...q0+H£mfC~”kÔlirhF£º".ú%7-Ø<Ñp%.

p~éÔÖ~°tö3 tª¡]àX1R4€Ê

ÃVS&À+İË>C²yvòyîNÈkR±-6"İ¾¹%°Ùa¶zÜAİlvðUöâyCE5[Rİİ!

s\_4?,ý\*ly-ÜÖçf@eSôîæ«^—CéeêWpG1Üød8p ÷¾?ª¶E—

~©òwž8¼s¥ôªfG6Âô\$«Y´š,Š`SY=7iŠXĚëfòF\_İÄ,z€\_QİfÅ"e

¥řö®iîáfPœç\$3l`8ās,[ü«•|ÄÝf+`¹ç,, º“eÊJa²oŠûý2ØßfÒpLÿ`

„ýsàwjç³)UûpĐ”ÝĈej) ~PSsiúúJà

Ñ™f³×İşeY/ç@”#÷únmû”iwuc”3PöWùÁü,,æêæú—

ø:š”Ã™çý¾ôžV¹Ü0p&†4âpc²Â~ÜH»³½ELz9«H®)c’•Wfy4(Ô

„W2^³ÁW

uvl!Â%°c¾Z,|#İhÔ<Šû#Nf¹½Ö°PÇ>ì#-³5İà\_bož6Øà%.

í³ÀlaßbY!ÎOW\$ÇµøûÎ-®áEà† FÉjf™/ž¥#Ç...ÆðÉ”1pûä»2<

½İ3ÿOÓ¿ÆÑ endstreamendobj9 0 obj2033endobj11 0

obj<</Length 12 0 R/Filter/

FlateDecode>>streamxœÖYK·ä6¾÷`ð90©\$Û÷ìö!·††Üø€v/

ùû)le«ô°<½ì† Ó=VU©ôÖ[g9üsú2^Aœõ`œÄ¿N™ó8|

ýcøõ\$ásí×¿N×û „:›Á\*wž†ûiÄİ7\$

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

÷?BfaÅMÜÖ«ôfP—'¿ ?ÆçòÛý—Ó\$ûém ?

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sŭry»Å)Ç 9'«ñóÁ¹Ã÷³9Přăx'3°—'ñŸ')õ,ÆÿgyO•'¹.../

ia¹•ăÿD'µæüoG,qZtñ×9LN...ŰŽ~“k'áy×Uÿ0-5T̄t-UÝ!&İ&İă

ê³/c/#¹/₂“6PG]Ôíxvê,OØX⁀(Eðñš0A-...“QÝð£©oFeapJ¶

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P[ 'Ùs ž5\*ç÷9| °iØæ×Õ¶fU`SëD‡0;«2ª;NàOñŸGûP  
i)"...ÓaDVí`Tda<""G^@y7.ý:ÑAò.oã...ì3uÄz.ÃBîy%Wæ\*-  
ø=' ÊvëUðW“.ÒëÛLYÁ«EZiùXµÛ^ý%#ÛÂ...ÄGa'öpÙ)o©\$Ê`  
[Ûâz|Öö0ßè!mF3Y:JÈvÛu,®Yj|çÇªd,1...² Èëw«,„L<Š?;1]:KnP  
¥9q×""mİG¼p>ì‡İÄ`Ú&E©ÉOĐº...¥‡äDi«Â`Ââ3s  
•Ê`Ê!4aÝÒaíù¼c&ø\$³BV.6rP26r¿'¥'çap”RkŽvJµ”,İBrx—Ø>Q`]  
5`~mnžB¹²Öb” +‰‰³c³⁄4N'Ú–ÁfóC7`”øçUUÈÖxÓ+ø”\$hêÀ`¥  
`žtª©C”iü»I[D.)Ñ%¥Æº|ôòìdéOFØzvxÇİ|  
(Û`fp–9šá”ÆèjİfŽØ\_®1¥&FäÇ½‰W5N,„eMè‰.  
ÖiÇ9ÛfýO7Ú\_¥6ªi•»eİMœ“ZvÚp³⁄4çÖ¶‡Š,©Ó3`ãÂ«ýAçç8  
,”³ûsûpë£ÛÂ,Æ`šÄfsÍÑŽ1š•UšëcdmAF¹,)O–<KpðĐ[B)  
7oG×²Š”‰‰‰iÿ\*³+÷Ç.Ö5y€–s•,bçØd  
(èáÖ>&²ç áRÖ•ÄZ<ò<™t0=rÚ!ÈÖTUCE”T|`ø×`ýÂf)Ö¿~\$  
,ÜiİÁNŽù5ÇÎ`O7.yŠPiÁBžÄUÛµr:|UÄôÛ@®eé  
“°¶¼–ÍÔLÉðĐİsk¶¶g‘®÷⁴°=ðEÝçİ?ouá  
N‡VLÝùÑRÒ ôômW&g?&c°Ôä`ù5c³⁄4c#|û@UÇ>JAU%¶  
(\_İİ&DtK“iØ~iUB  
9tªÊÃaBÃS”0HI`C\_°œİ\*!³⁄4š\_ÍF7fâ4Ý@~º H/BçEx|W4(jÖáT²]  
vW³Ýe”÷Fúd\$ªÇF—/[ö“\$mq4““O°ß€^4Bw½⁄2÷b”W ö`Mçò  
j`toÂ¿Ä|Í@‘OjP&p`ÉÛMÛü¼Ý|ë–ö>Èh(\_+ý\_xouT÷p-açŠ  
j]“©eoŽº#–µt(“\$m`œú×œ;õ6Öİ³⁄4bTNÖÖTN...  
œtë”ù\_`S”“`YùK”–ßâT.ÉJ?©mÄÛøuÈY”fµâKıYCE¹Uw^  
¿ÿÖújxendstreamendobj12 0 obj1390endobj14 0 obj<</  
Length 15 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxœİÉŠ+7ð>\_Ñç€



Ý~†öx|ÈíÁ@!.,C      ĩ̃BO•ÖÖÚ~B°ÛR©öMÃ®|ùúí~...-i³m5|

Z©̄ēòõ×âÇĩ-?ýüýýípùÆ•½ēĀHY-ĩ\_-ĩYbábùüĩş,

¿q¹ó>x2Ā¾Ā#<lûEB~ft=ÛSnRíâ&äÿeoÿùó‡.İ./5»'##~

(»ÀÀpùGw‡P³\$Df¿~ü\_H®@2ø½PøY½EüñçĩÖáÉúĀB#,%òà

,~È8™L0~x¶Ž èKfê`Wp;çtía==WG2°fœÆFâ×²#~Ā<ŷf|–

âçHÀ0R/ŠŞÊX=ÁÊF6@aG¹:R”p|È]”èD3í–kÄ•jüÖ¤Øžw°ÚOÖ

+\_rÑky`CuÆXÛÑT#|O5ç×«4ÈuÖĀ“¹ÀCÈBžŸ^

„h“bMzø»Ā&2Úsç™0Ycá”ia~²fzç

tÔYûĀügArü6Æ«X üÚYàşLİ£’:ç%„‡™„)Ç^5RÁKp×i”^ÀÑá€

€hç–âá”x–UĀ%„õ>jrPL²£a’Ž^ŸWy²¤&öé2

„õâzä3â ¥ç”µ6a¼VT!üi?ÿİY¹©Æ%„ç’;ºž#„tj^©,

,³.>Ô4ÊhÇE`ÉHfx,Wövl>À,KxŠsF

+İİTi4O–ÓÁPİ©ñ\_jİpêhăĀµāmYĀŠKô”—q®<z Lrî²ðN

`&«¤İs&‡\$pĀĀ©ŠNSzP®x&C¹â„XKAdıYD½ĀJP¤¤dû#ûg:i%|

â“U6û¥ v¾⁄⁴\*”ib×bQiÖûVv”]”?O|X@®¶”6êŞÉ

+,»KÁØKçªj ª\*¹NrÐ0AÖ®c—|”CNªĀ~C~ª~Rb+[fUvð\$=İ÷„öÓd

+²S!3Óv;–%„:³poR©%„à¿~Üi^T†½’âCE—E@³%„<a 0)]...^|‡3

(ÜbNi\_ Ā–ŠŽ-¹Ů~iádĀ)èØ&:»&—;%Áýû^–úŽŽ’3ñE^™ú!+i%„

9yøh9éZrCE\$” æÍ¿£C™½s8Ó®âŽö®Q&)

0tĀIAt©¼ÚÊ¶İHbp`ÝB»IA7†NÊP€³6TnMÉ!ú~çFÖŞÚŸ!~1WtY

„¤



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

"Li÷h>£mLİÓŠŸéÍ2Bt[Žà,[

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

£†Æø&iRÉkê“a”UWRçâ<\$ªY‘ĭ•£POO©m[†4 ‹yN@žÁ•»hŠ)

ˆXÜ17°Vjää¼±¶|ééÖÖ°ªzÝép^€8Ö™Œ Ð.GÆbÄĬ-A%.

& ¼h !KÅ»–

yZ&Í”ªÛŠ†TptXfŠ2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9äf`\*©iÜéÜÖdäCE`¥/R\$¥é´ºhewjé€6jÈ Á%Lµ·ná¼4...5/

₂2Ö"ˆÎâæA;₣'%'øˆÂËËrÝ!¥TîbÓ\*,,ˆ,âOògç#TÁelÔî6"UÆ|

Ô!aË'ÔöL®ÊF1gªfksGM|'₣U™ÀW@Ähx'ÇWiø•â'i®cà:¿Pê\*

±²DxOŠ=wägøcußî.ä₣sQãð†¥GH^<ÂñÖ°4÷ŠÛ¶Ð~)ð`Û

€ÃSz,'tA÷\$ç(₣'õ¶x«v³%4'3?¹%êJ|D.ÆM

[!Í'9µE|z³/4Ž=i[T'Î&.;]³CEÁ·a/).ßΣtò™`ë†0~5ñ“‚ZcKº...^

\$cDÝmž@wç/™xÓ€~JâÉLÓ©;ÎföÔÁä£cqvÚ—«Ê°‹m...W^!N

„¹ø†ûX«º;º-g`i'⁂+4ÔqŽUB¹/₂³/₄B†ân®NrklÄBíÁœâ©€—

s,ŽÜŠs:ã[zÇøð

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

¿#ù±Ÿ;ÉÜö&¶\_Mš0\$#ü2'ãE²`fÄô?

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ÂlyKrI8ð¿ØÓU ÓüÂ)à"%ÛlpJ=±wÛflÖ·Ýü"V,c'

Ãi K:p'pílw·ð<â~\$‡.ñ~F2qj "ãl·l@TèŒ,c^âá|ŸŒ

Í@fÇK ^šãlhŸÂÿ^é=ŠPcÖ!Û&,£ÀÛ"5œ8½ À‡S"ûýD...

3üà#B·àféVÒA+=H¡±Â£àÛ‡Œ§é)o«Bûc

¤5Û²Û?"¥ endstreamendobj15 0 obj1850endobj17 0

obj<Length 18 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxœÖZÉŽ#7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



½÷WÔ9€;Z«J€Ñ€Únr ,Ü²9ÈùÑB%o¤(«œœ&hL»Ç¥...

â#•zÕËß/ -

jQ`nñÁÇBÁú×uùúëðãwĒŸáYüüúúĒûç·îÕ/>`ÜòùĒòýŸ,Ú,Ÿ

¿ýtVN\_t`ÿÜÜlīæ¬|üÜÜY½ëõMŸ•3çü—Ðò

€Đ`óâš~ ;ÁB6=e    μĩŸ¾⁄Ô`ÝÁ`ø,è6FBâ¾⁄mÕ6,l`«YoeÓ

+Jký†ēñîih/iiQM¤xÂŸ? xùø|ùÒiÕë¤©Õ`Đç£€f6?

Žf½fÁB>Ž2Q,,|¤¤JwñŸ»º«»ÝœfŸÃ÷úJuLàyaÉr°KQ-ĒãĒğ\$

¥^ºÍá5aoŽŸ`¬Çm,Ē`€äU    ÜéO£ŽA`ô,,mO

¿9h±Ÿh3éÆØ"μÚøé|4ÆfL¬ü%o[½^»5ê¾⁄Jc.Đ4gv4ü;Y(~F%

Ü½žGGâÒäÓÇ`Đñs¹j€éT×Rs†ºöëkè%o\$×CP:Úu2bQŸ`ªW...

ýõÜä±Âv2Ã4ëV¡öPsŸqa‡;Ÿy¤¬èèè&¼Úbì>Đæ`Y`c`%û÷é

ÁÓV8é'—Í,¤O~üLm...dŠŽ²8Ül|R†ãDÍÇÖ@€p·pŠz9%c<DÑ£|

½ÖŸðö'R""mš¡'±>á³€¡#4F|—ü(!Ÿ¥



—l±§°x'7

[Cœ½0@&Ä;n ;üÈÜÏp@6,®Qã»ËtQİfpâÂœ,,!°Y7'Â!ªëJ£V—

ûR©İS1(ž-;·J|ç=sg°[nëià—Ú>teÒbtÉ

( Çäeqì2 ·í<<·yºQÚñß»‘(p\*.Ê 9¥ĐÂûù`E¿·Ÿ9›`zi96ÂCE`|

mÓÄfêf©û2RÉ—ç¶qè;ïUÚKù:YÂQCE"ÿ"ù1Në„Z#"–9¥t©Ù#

[ôAËËêhTëK»w"·z&ºÄtÊæJÀ«R€vÊ:5‡&k%.mÔ"Ä>HW°

0%·ÙµTÚ°ò–MÆÈ'İÊãË">\$‡V ]~F„ĐÀ²µø~–1É;^Ô`bJòm3CE·«

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



†lã<¼,ùâf[üÈ>IYP¶h,,”yf’©ù²5NVÄ®Ýc0kr%>WMÄ.ÄÜT...

VMUí"ÒÕëŽ–Äò¸šY+T'[X!w†ud&àlāécÕwo«â|(#9·N@Mö~

(+‘ê)NPZªiæ,,’«šü£,-¥ó0ĂšVÕÛ2ÂApê4~œgž€â<·+|v~jámX”V<

^¶ºZe-¹ù2“ÚÜH;kã~5îd ;€«”cL0HæÛ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Köe®Xùx"Xé.à

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCÈiæÓx/! :Ö[i—pμÄ¼Ê'~lú8¥ f£m

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ÈZ9í×6cí2õTÂ[—½3[õ"ý¶¶fP'dÑÉ~¥ste!ô:÷A©üC\_œ

±pze"óXÖ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1B`-eµawE5:X GŸ@âGtèh,,-è~

@%¾Gb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





μÁ=¢,°VÿäÖK?>oÝÐ-ÇìÒ%。T«ÔÔ5Áj6i"ýèÊî;Å¬ ¿úÿùl"0»)

Yæ>•.,9 \$†M;§ñ1MíCëx³!î,-VÀ©N~j²ÃM1©C iB ;ÖnOXpHf‡-

çÇEËÛÝ-íÐìCEšÖÔËÉ@ÿ'SqØYü2Ð-Iÿ.../ô©B,©íÂC,,~D

¢·é·²Üøg!âû·ÂdÂ×bp!VBó‡Xi?Â¯·7,=

±öu»GâiRdpÖËöÈ~pPv¼DÂf äýí\*~pëšxÖøHS—IAàLBbÂÖ

¿áÉxg'f@ž±À&@8,î!l,O2'=œ~Ú4áæ±¿"É:=O~FèuTØdœg?

„á8û!FYª,,‘i¥)Ê4FKPal<!90Ø|gì9¾4c[oÓ³®<)î—i/Gª%

B:Äÿ4,vs²μ#ýeir"!lze=z£PeÂiP~çlìA&îš£w÷')6(™~ôAiaÄ>!@

ÚôFT†p|uw«óäw+ûÐR9RÝæ)ZôÐÿØ%。‡-é,KM²èNô~âXEa÷m

%Umv=A7~uÐhkÝ@á!ýš#? ±hÏU®÷Oèšñ®¶hOìX(ýÈŠö¶%。

Lz¼)/KäÂÛìO¿EAI,Hû,,€ð"oZ,,ÇÆEóóÂD<ófðž|Â

¥áNFê|~èÑä.xUÒ¥#|o!'>Öì™,u|°‘i2ì>WÝ...

væ\$ÂÐÖ2^™ôÖ“·μ©œ³âŠkÁí#ùŽp´±×b² R·

£KMr·‡·SÑoT, Àã=“”N“@©p#ÂÂàμ\$Ç]4ûàÖ©A;

ÚÀùí.z,î]1

]·Ô±©YiÑèkTrrd³3>°T³‡¼XLÐ¥àÖitÂ%Ç/RrNA\*!|Yø«ô²ïð—

£øà5î/Ë?âî^endstreamendobj18 0 obj2092endobj20 0 obj<</

Length 21 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxœÀËŽã6òb\_js;|

J\$`ÝíCnÈa°·iÈ!@rÉí‡E·E‘¢4ÙA,ÆX±d'½«hq·Óÿo

¿ObW3YoÃ\$×ö:O üwúé»é·pþøáíñù&¥¾4ÚÉi ]'iÿ\$ì\_]júüß

—>|Ü/ê&W9BâMèø¾4Ü/ö&lx\*OøªÂäen^(ÒÁ"\$š#×Dp\*q

¿,ðö™BH#mø<(V·ðZL>ýé¿û > xûø|ûq+-ãAZR)oøð¥

¥Ó1@@ñ²èE'Sæ~‘N|¿xÿW”P.bíá²ž-&™fY>&ÊU#ÍŠòó.²OJ!

¶LÈH"f»-,ø|\_R"Âöÿ

„ý·qIU,Ê—`CEWqÜ»·`ìØîç]



EE<sup>3^</sup>œ Ÿµ¢”HðYIÉ4Ÿõ~\*Õ÷¢YMI°2=E,Ö"ábÑÉ~;

Á%.\*iÁuĒ4&,Ù@ŽİUßØ/vmJKı~³/4z@ÙzôŽāĒMëÖØ•Žfá@vk!

%bĀšāĀ3@hQ <Ñ:eĒkn†ûØéâ6<žV \*š™, W‘Ù ūíŠrβ~“(•

¿ê~XNŸ¿Āäð...Ü¤...Câ7]âK;GiJ»ÜÚ-βæŌ6;ÔØCÓ‘ÖĒb:™-

ó†Q×,,8•œ‘Z »1<sup>2</sup> ;\_`ø ‘Ž,TØ±ˉ£%Ű™Ó&)

ŸS^İapbP~ÆPôga\*G [ys9³,€l&ðyİø>A™Çm½₂.}|œrl7H?

ã34bŠ©€â9W`0ÔH+BC~¹ÉFâhžo žĒĐa-RýgžŸûĒHPb|9ò7ªft,\*

¿Ā(Ÿ C\*5XmG9Á!2CèA0f1Ò¼xa-y‘†¢>B2÷ý]Ā

˙Ñ‡º˘Öffœ0.;01ëe“0ô3Š%BQY±k-„¶”yİº ýĀ%—xé

¥žðüWKûo—!Óıõ¼

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uGp>hpäŽ-ÆanEİ š\*U¶ê™c9à\$;³)~ô\*X'öç6 SDÛ&:i9>5

Pj~ÒT÷ €ÆİŽÜ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ů8Ñ†Á^Yç°¤•ê°|°ŠÁ2"À5'

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NY'ÖÇ%°b§.ÆžöĐ†b²º%°

=dÜY#éR›s"~;w5Ê¶sŽS»Z'4áUiÝúKL|ý.ÚpJSĚBàmC³E¼'sb

—~|™m& ót'øAŸXÑ`¾.,ÜöY†:›#W[l#İ£—{x''¥h%

¥á¬c\_ÈBf©Úñ'ßq<xPa`ãí~¥¾j...

Ä•vôÚlāíWôgcÃŌ◊hkÇs#`iH§zt+ ]µ|jêÄlžzpOhă'QôQİFC—

íÉ8½XdùlÜCûmÂzh¿F5É 0`4O`ME%\$.á.ß5

į\*d½œ~ÍfıDëÚRXtGœg1)Æ@îp.]ž8Š\*İ6Á%° <Ö„JàŽú FZ/

dÓ£~ì[mêOÚ&Kı...įxEÜă1âÆç£dōıº©½'¼Ô"">²üyŸİÙ)

,jLµjkNJ•ë.ª

—B'•¶sRq....!\_¼Øăgēİ7@%°1cÅ5j8RœrKÛ^\$ÅíCE-|šZxY“:°%

Û,ö<û—|L@V•k;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



]NiØý<sup>3</sup>/<sub>4</sub>7×ô´¿f¿‘5|\_Z :5ü“ÝµË...õP\_ôõ5‹&ÑcÈA+<sup>3</sup>šťV\_



~0DW!4Ks,—ñØŠ/íMZçIR

Ô8†uÁĩŒÁ(q,·éîKŽ#d

+B"ÖºOž#ôXWäü¥U[]!½èUìâ>İPþ+¶ç%.W6ü[Ø

±òd|Ô"¹HμÿFõX@Ÿπ¹=Ü|m,Q-ä¶lđsÇj,,m-?Uşk´ Â!48Y

£âí@şFËý<çä"¹%XæDÂÊíÎTzù´pÂÁ"»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ž©ùBîšy EPlšóàèelÊHLY.Ke²æä °Æt...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ÑOÖ™õRB'·'·ää†@oCEš...³Ba\$J°,ì«á´¹|ç

ÊÙĒÁâSEH;»\*Æ''2'VGÃs<µ`û8·8zú8Ô i «0šfd»i`0DÁgŽiĀ|q

lèâÔ\*KçĀ#üRTQi/Æ4Î6šÃ uMq±y½ß†|¥p|Éä£q—\$—

«CE³”C·x±%o.â>Étrr”EÕpFâp\$†ó\*SÄ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/2™|æî³léBâU\_Ü3ê,K%¿d:çóTSyíHT''||†Ü&iñ3QZ85™1uìl.

¿•è"W¥ñ8~1`z1iG(9KÖiF!É`"1¾êS"ªjYµÃÇ»;š-8Êa/

\_4zð|/«ÂCÙOðÙ2sD§iËqDó§,-Ü4ÆkLÄªj¿)åÄªÝU%

p=I™MKpƒT2Ph@Áv€Ê\_-Ôuf,,L"tó\_-yğäläYª?

w7#öZBûxŽHgİÄ`Ü:Üp»7Ñfý1/2mÚp~ð^îGoBà#Zsüÿ

+àCîmÔ(YøJUíœ‘

\_€”É\*!Ñ-,l

|'p?N MÛ endstreamendobj21 0 obj2063endobj23 0 obj<</

Length 24 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxœµZË3'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





60ôñi¥lí` ¤ñógOÔEÿpzûã¤NèbO.¸ø;

€»L\$? >ýlé÷¼ püöíöù!5ÉC¸İ\$İYÑß>İl>Óç/?

íyl@zz×WíBÓ\_gã|«rñÓ¹®î¾¾h«ïé c3l!

U.†MÜÈÈ1~ Òş\_ÈÈÍ'är'ÑŒ¿Bp"Ä

~©ÒJ,,ÿàÈ=‘

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(#BFÚl'Âg¼ 4Qõ"LÙ·é`j#>:¿çÉÑ!×k+1·& °™Ó¶ð;6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

©NÒ`øP6o;†+jĒ12#2f;Ž-f×¥†`²²^.`x§`²cdmÙœŮ£#ÑÄçh™C

[°œyĐœY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"°yC!'çĒdàÒ=5z`xAL•ý''•B¶

âÀÇ cL–Un`–lçÀ

Úœ|„úÄ²êTí|'pö5fæ94"!©"Bvpæ6 W~~2pH;âVÅ´¤\$+êd&:##;

£äizç%T, q÷^êPuík[÷k¥f±jjβQÑîlBðxB°eM³8†:ö`Xo]â4q2—

ó^Tí6XáÈn6,,«ôØÃ(éoâçú8°RZÿkç½';+^(™P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g °ÑR¾'ŠT²K“,9İf²(İÄ[ë×(ÇbnÀö®>u¯°²â¨6¨İNRF

¥šiÖ#ž¹•ùÒ¨óÖ'UÂs¼Š¨jjíÄKCEMoÜóääPÔb²ðÊ|ç²Â3j°

Y4ðð~6!àÖÚqîôçV^~áXc]P+-µ;İÇûn[Ó·P/...

g'6y7|,ZÄMhz†W\*Á¨ÊCWÖÓPÚ×&+šDÇİİpÔS'h~ŽU?

R¹½7sŸ6BA¨MdA\_?ö;ØkrmTÉPâzPpkJ'ô\*U

£À7ðG;\_ŸCO‡3Ç'ÁMud~(ó¯>núÊG‡|ÓVÝ+ÑÊÖÜq+ó>

'tīÜè‡İš.fÜ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





÷|Èû©®H¾¢Áâî-

&½Ú:u¹!HŠñ=Æ~th×l0™,.Õ\$«QY²öμÖþubQkÈZW¹\_¶Äæ¡B

%) K•0¾ÑV\*JÙpĩ²āb3«W”\_£öT”|©õR¡Ò„SÂ¡¾,îØ^ z½MGð

+[:³P£...ð,¹²V2GT””·B93HH⁻\_B ¥|‹ÝÔ6jð0Ô4ŽöÛ÷&8ºM¢

£÷BÉ¥,,&²íÒ4î¡¾Ä

]O8^•%•õ vî'‹ÈhB&-/äÔWýöÂn8T@‹ÿ|\_f¥#»šÛxDfEOû/i)E]

W÷>,um`kÃ<^AâÊÔ+H¹%•D)]@|.Dó¼!q£žZolñŽñ

[f¹N›ÉÜÜçÆ!O£³š÷...©NìëhçC£:5ŽvZšÊFKÑ=U£5

„Š©žGa½PÛœÿRQ¾¼^d

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

üË·Üæ/ôÅ¥"LëO\*äFèÖÖ%or...½,?

•^^ó³íFQ»2"8dpXøúhÀ2\*öÈSupççPÉé+³wH"R1]+îx!

9'x5Mâ:hISÄë·@laAAëæmŽÂ"3Ák,ø>ÉSD ]Ò;¶±BceîGüüÖö

£¿]“84ÜäÇñÎ“vxØP4Üb -PM\*₁tí·...·´Ãœ^V£8|T#@Á!-

é0Ak^=ãİš²ßû-ßfbýe.^>4%U‡ßKÉaâ4OÁÄÜ·œ...

,½Öîý/Æä«¶¹íZ>₁ŠüP~"®tpö,€uY OMmh—ÎG± v™Cý÷

„xAN~DG¬ë—h÷äÝ÷»AeÒĩ³⁄œÚ= ôÉûaR

ºõÖï0~9ýp±endstreamendobj24 0 obj2206endobj26 0 obj<</

Length 27 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxœYK<\$7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/4T"s ;¶lxs,êééCn

9,,Ü² äÈ^ò÷#É²—ë±“

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Änw—eKÖ''jæj» ^pîLg®¾

SÄÿ'®÷ík÷óÝ\_q

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ÿ³⁄⁴ýñr ±Ö]C7°é:ti¿u?>|³Đ¹⁄₂ÿpĒÍNÖÍöf^g\_ñ7ěã÷Åöük³⁄₄Øpf|

2ÜÅ84Ápç

½²ñîa~Ž# 2Ñ†ù2ĐìgÔàq:° \$ëHHìÜE½ò×zÔSñK?\_È^e‡ùX

óøÜÇÿæ\_B zy ù²r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

®Fnc‡Üä0³! žøø '°@;ÓÇŸæmô1Éİ; ßQcELWW!

f™ßŸÜœášİ^âf"nİŠ£šİİ Ÿ#:#(Ü9~çããË8%iÒ¹vLJÀT÷^Ó#İ.

,ÜX İvÃ ¬çpfU,ËQHàFéj. 'š%çW»ZJ"Ā, %Ø<₃È!

<Æ6©NAŽ Å!%„ÜùâÆá«|'èD'qòÜç?

Óžãœ<ùu^ÉİpËB³öfGªwXöÄªÑ¬ñö?

Ró3Ò8æWİû"Èß™\_íŒu~EB#»-1üKz

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ž±à/uZ)Öè%ö(

×%ˆÃ

r4;áÉcd7¶~†¬ÓjëîY...;Jý)Ö÷§|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d~i%²±ò™@6À(žêâ\$P

Ê í½ÒWkD\$Dÿĩñs©©ÚÍ&æA0P€ÔÀ]6Fß&cÜÓÊXpÄ,ÓYQ—

fh\$©Ãh,öÜ4dEG't±ÄIP...p5,,èP.cꝑ-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

méEi“)ø<|’•^2u'M`\$ùH¬ nn0°V3à@àóZó\$(Ó:Ùy%°`kVæ!ÖÊÄ)

0LµlâøÒÝO8ðÔâ@oÚrĐÀ+ ‘U•nîäé¹CE&ç«?H¹⁄ⁱCE\* \_ 1^JK%。

RK³⁄⁴çÿ•ç)”Ñ]º!ËTÂE0¥“9¬>uÃÚŠ1Y µaÝpú<@úç

Şê~’šăxi= /~4îcZ<lĂkì`Øôâxpñ,\$¹⁄₂–[|

ÕàbÂ²Ž\*¡ xìH[° @eœÔ^€è£?i’šv^•.Λ

\*''



Ė±OÚžú\$,|z °Á>¬`Ė>μÓÙMªh,,—K;N'hPα,:ŽÔp×Ü'H

`":K•sHbHÂ‡¥s¥d!,,2]ªóα0tN%◦ÈMÚ—rVL(ÂfÑb \$-

μM¹⁄₄av¹⁄₂>ýÖ»AAçj7Ñ®k•ê•U(SM‡~ĖŁdç\$Ó€U"ÔT,"¿ı%

n³e)%◦μĂŠÔ0êz



e1\$miX«—15·M°Úém¥¼Ò'öJĚjwBi!UJ?s¾çÍÁ4^K¶SYPýJD

\$^—H<u/|¤,)G²Á%n%ŰāÇÖêÖÍ)Äuu«±gmĭ yj=CE.!õ³D÷i/;)

^R:â«jµoŽñh¼Š‡‡¶.jöç·€x¼.MÙGêô\_õQcÈcùòì®¹CEâBc'¶½

X4²Ž®œ\$|...Q\*6%Š>ÕÄ%P\_ÑH?i,,ĀsœnÍúêä;'ê6[”Nqµ

j=™m2àéešnÊ5ø

s/äöâ!ž%W`«b

W¥ë^¬¤µOÇ3»âym |Ākõ6õû#£j¤Y\*õ%“””-=%:u\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Õ^íMóÂ^•«æ¶ÃI,,[ÓMÙCĩ|æPÔ)½'©ë7;fÆ;éT¶«HL

(sOqçWK8~O X.—f\*zŠYİÖv7€'iEzÚc1HuİŠÖà+|',Á['ΞéTB:î

\$÷†++ªÓ

‡tœ<,,±âÆP4ŽÓH"l«¶d2×¹G'...ô²"yðu[âlz%Ò"ty™

€aiÊógL"P~rĐôfªK~ÊÇ|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U88ÔdEcUj>Ü1%:t@°o'Zôû°k

µéQoæ&8öR9\_Ô

/ŠŽc1Ý–ð³q½Äç¶'f'mĐ«Ój

¿æ|PE@â~\*Õø

ŠRR"6Pö~Zlqçç^iòÓ–<»VM

±9IÝG7‡ Ä–Æ'1ËýygìH ‹Bg«â\*,[ÚhA™R\*S,,6vhlÔÜÇ©–

U-|Nº ²ñÖ6 ,XöêKlŮ;÷ý'j"³E0Ãš9š–

V""jM^Ó#™âregÔØ7:Æ"¥š»+CA^æjm–Đ

²al‡~"jì',>¼Šü:Îdû1ŸØ—

k...İ™&ºÇÛU!YªYĐÀaQ8èÄ™uSÛ\$Y<çÝZ<...

û'ÖääÈBÇ\_ì¼Ö¯|±uÆ¼È)ITXfðÿÖ3bo[

wà...°æ©»~\_Äqp²Ý8k¥«9¶w^;—Öá#æEO

Q·ŽðçŎÍpsá×âÆ.ÚY

ÖY°"5khæ–¾>dÄü J®>¼ËÄäÈ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

0Pëxooq+U<KVœP Ž–BÉ9

¶Spar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Đwà,8'y]Æ'Y¼äXi,,IS¥Úô:„qäÊQzÂy¤tê”¤œfÿ.2iy)TS

\$¶žb9™âFÄòl#äx^ß €'óL (-endstreamendobj30 0

obj708endobj32 0 obj<=</Length 33 0 R/Filter/FlateDecode/

Length1 61656>>streamxœÔ¼y|Å½>3»ZÝÒè^Ý+ë¶dl¶%

ÛJL¼ŽccpL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1iç€,«±jŽ\$...Æœ!÷àHilzP(ô½8'''àòRZ)iK)´¥¤i¥nóÚ'''ÒK

¿iŒäüPĩ÷yÿp¼pÙ™Ù™Ù™ÜiÿyŽ®¹ád@£ˆCÊüëÖýÚô÷ß „^F

[×βx½üØ/²VÈŸBHýÂ•Cˉ»^pê,,#\$Ôo¼vë•7.š#d†göeÓk7lºò/f

„Æ•@M› à›¥j,‡ûÈ|ë®βçv4.ûWlĩ-×n^¿öš=‡ tp1Ô iºµ[†~)>

¤BèîâO¹½îŠEĩ«¾÷i,,27

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mpôöP«CEDi³%lë†F®züáf÷Ça

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6(ÄpÐ?x

ôžp¼JPK´:½Áh2<«Íp°\$.Çëó,r¨&%ºÆâ%ºdm\*]—Éæéó...!æ—

â—ÜÍiSÚçvìëZ ° ° qİ'pK—.[¾be\_ÿªÖ— ÿ¿ü©îfs1Âéã¾

„¼• çİ8ß)-\*ÿS]fÂ¥«Ë§8ºzÿV=ŠçÐ^Agp=zMçEè[¨õç/ìùè

´TMÐVüâQÍC£("º

«Ðôº

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ßXS(ºÑo±uéDCÈ%ŠăwáÚi.fV:Ôp=˘ÅKQò

HŞàÍ»Ě“Ě...ăă×ái«è÷8R>€@îmdAq´YÑÕèÇàs0ÒZ‡Ã7ăwQç

ø<¿«|šŽ \_ànĚõ º×µGDµðÔ7º

O–ß\*ÿÇèèé6t7CEø š\$@CµÉ(†.B£µPûô¶ázN)ÇĚsĚ ô1ô'''/pjG-

DkĐçĐ×`5^CŞÑßºðWñ“püÿlō:ŒÝ€¶nVi1ôt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

×ãâ".X-JçâP.=ĩ?.,NânŮ'ñ÷¹GU¹R[Ù^v"ÿP.

£ZÔ#Ů<¾i8<sĐPÀÕp×ópzUÃô0Ãè+è\$ú)Æã.°î CâZ8~G>K¶

—W—ÿ/ÆçAAÔ

,.A«Đft#º ¾éóè8úouŮÑBĚWø"¶©Ĭ"¿kCsaìK õRèùøJÑ`Á,-

X†Y`à<ñ¥x#pÀøüH`

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“?rãÜKÜoø&•ª<

zrç¼7ŒVçMð>

«ý~iãèèEiÀ13zzÿèl&óàøy...ü—»“ŪÍŸSÝU:Uz~ôQyR”Íþu,=«ðgì

„1\$ñÕøÓøç`äcä0gâD.Ì„vn×İŸÍ%„û÷~, „ÿ•jjjelõÚÒşJ?-w—

İ@”J0@8J£<jø¹ éß#èft+Ū...îxùÚþž,,y?‡^Dç@oç÷á

,1\_oç îN|ðwð÷ñð÷øwøz8π%„‘ÖE6’;áø9I^#îp>n=...ãî

(÷xž/«àX °Gõ~ð’ :î^ ^şyùŪÔtítÿôoK”ä).=Pú~éää0þ(ªCéå

€ÁGáx ñ(zh÷/ÙXÿ, VÄK8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Đ†Ö†çă...pòàKàXÇJ¼ŽµxPÇv<ŠoÃ·ã;ðçðýìxæö

(p6>ÇSøi8~ßÂoã?â¿bÂ4GlœdlfÚAæ“%äR86’Íp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'r#|ÇÈ!rCE¼ÆÜ(WÇâ†¹=Ü¿sīs~rÿà      ÿæ³|+¿,ßÈßÎ

¿Âÿ" ÿHTu³6©Q=/x...¼°ZxHØ/¼#œS

ê^õ:õÍêWÕeM"ÕaPG>Aò²Â+øÓ\*;¿...¼x!qC³x9-~@-q×r÷q?

SJ%öJp2pPÁJÁJSp×E>ä6ää9U³

+Ñ½"Æÿ\$¿#gÉx^FpÁ      póø)²TMë      £«?çüíªw"¿D³È-x'ü

€»»½ü,š¥z¿¥z,,üÉü)bCoVĩ      ÂC?!W'PÝW,,®,uÿ¶j

¬÷r7@â^âA¿çÂä~ø

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~"Æ ¼^ËI? wDFCø~¤àgð·xaü8÷^L

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ðµÆ%º7ë;Á...ð«œõÓ1âqà^r†,ç³/4+œä•øÚ†9œØ™ù+¡O|%º

Ä'u5ù9n@zèýÙÒw)ÁV½®ªàik]Šrh€¼,,fnüŽ>tj@O

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prä!tsyo°ßô“ |5Êb=PKœEm;ð

'©Z, þú!ÐÿÖïÆ B7a0k%xZs/ß ”ièï=pl@p÷ôá^êçh v!ÄË

¥GÊ f.žó\_ð~j...ñB\_ăÓ0j(ó0<ñ•Ò¤Àqz t

œYày/¿(iâ«a†WZ

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<ñEtUùAÔßiÒòiaĐšò×Ê—jhiùq ¿7—¢&'CÕOV"R|hì«ø8ð£\_ã  
€n/@¿zÁú#ÿãŸzía '³|oùÈëQ+ 'ëitú-Űn5—. &É]Üp".Đ%  
âÇÊA-C·Ê×áy.zTÚ3Š³Gv'2wù2ŸmĲE³g[š›ùÆ†úS—  
NÕ&ñX4® ÉÁ€ßçõ,%—Ón³ZD³ÉhĐë´µ â9,Q²3Ü5  
(ÇÇùXxÁ,:z^  
k/(—j"ë“mÆâAÖLpdKZ^ù/-•JKâ|K,Ê"µ.-w†ãñóÂð^ulã?7/Ű/O  
±|Ē±¹⁄⁹⁹< wJ>æÉãxPĩ"qÓ®ĲÁyĐŸ½®#Űq...®.èôŌCnŰ:€]  
s0ĒWç-iĒE0"qOx^ç;,<Ž'æ·v®Ÿ0Pl\_ç<o(Ô—  
ÇëÃëÆQxĲ\_9Ăš öšq;c^#\_Egfi"«'wŸ;!çuf)Ă†ð†µ—öskúé;,)  
xĩ¹⁄⁹q×¶ĲŌÒÇ·Đ¹µ£oÇ...µ^ñWšt•LowíŰ!ĩ»«ĩÂŰ½ö÷Că\$Ű5\_«  
^|/,a÷RPEĩĩĩÇwÂ  
e::šĒi®wÒ'Á«âqmxnxÓ®«áĂxv£K.†z<Ê±ò)äé"«w-ë  
‡ÆŰ½⁄⁹ápμó|h×Ÿ[¹ŰýĒš°ôÑRYÖ&s5c0^~¹â|Ē  
±æ4×éùuĂtDá...ãòzFÒ†9μĐĒ-h×úh ýžßßă³qmÇà.q"«òuqUT



Ė»p†àû‡\$PÿdÉÚj%œÿ†h–BÉy@fú™üx\*5^

[KDÝ\_Æ8‡ÝèÒ7Nñð(CĖ‡zam×öĬÊÂ‡BôóP3

¡ up3>zl\_â^Fë¼‘Mõ“AZ39SãXNkFgjÍ?

>8>łtÇ\_&vpß,:m>fcçÿGõ•úî¥áiKVõÉ»«kŮ½2ìw•ú–óuŒ®TÀ

,óQX©...a½KWõÑøWE»ÂW.Tf1ŽŮ:ú8/é~ã^—c]

ü^v¾gzÓg ñQÁÿ† μ~•¹k¹öëBıÿäCá3ô)–|üXuNã³RŸ¼ŸŸ%.

ûO



İ° ‹fó1Ò½lÕ®JºOÔu±Úµ«+,wíÜµv¢<º.,‹á]Ç.,>®o×Pçà`çŸ(?)

w¹⁄₄ēP~˘Ä&<

@› ¹ÂøîK(øîŸ«úŽ%º vP¹⁄₂–î

ÁπcpñŸÔõ“>³RBKi!

½‘éð7ĂŠfDĂÚ)²Zž°ûõ±2ÍLFë'HŸLœ)#PÆWÊVFŸ(ŸèXÖw!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

0Äê`£œ`H\*>P`9iü

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ùÈ³/4jòÜA±â'È÷sHŞ<sup>TM</sup>#¹5,ê9""^ÃI±Å×àÈ""?hn½X<ÛÚ3ÝŠÚ /

žfK.d YçpÁ>“¹ÉsŠİ\$Ââß—ÿ"z4İ8p¾¼Ò½ĚŠ»1&Ê'Ân,~,ã

±ÍÖbÜb~¼EĚDm«©±ŠA⁻.Tz½!Á¼ÚPØôzBa«Ö, ©±ÖØ

Öšš üuÄÿÖiµ~x=«-#äEÄ`Jj±ÈbNTDNœ(ÿ:I±â9ØI@dŽy

\$9QžTÄ¶,'ÄrİKžJ'±ÍN»p,,B¹<Yfk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





¢H-x^ôÉKEGq'Ö~]JÁ:¤R©áÖqlá'Ô´òóÓàikmk

[Å©©™''êñ8²qQ,)µk†F:ú'',Öê¶&q\*Z— EÖ5h•u3ºÚºÍú0Úİà#Ö

—ð?±õİÄ°ð@?Náa@¢c''?°¶Ä!§±Í:Q~ç''«^\_fv/

KŽºX#ÑiëŠÙZ':E'':àtmPvP\_,,nNV'ØD±Qºò±«)Ü÷£(-ùx,,,áµà

°,±Äîr66:B...ÆE,±Öñw'/Ú,Ä¯çVDœ's-ycKr¥DveÄ9úç

ÙpÙ³ÄçÔœé-`m4š—G>ÚÉİ;÷ì.ç3mÓäü—OsÇ.ýÈEüÄp

€PØV|vf@ç%•Á@ç%•Á@ç±AÔëáéáéG|•4£Øh!İšñ®''F/

FìÛ!Û!pæs,^R'èsþëXKëi;Øk4Ë=¼Ý@S»@€xÐOá@O³<0

,çµµ³)úK%.'Rì%Ð±ÖiuàÇœG



júßDÖ?èðm\$ss¥äN|`v\$ù`:"4ø`‡q ioçàxÑC”

Λ”TM•\$P\$²êÛ—

ðXáñlziáù!~Œçpf•Ša`:Ý

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.GR=S »ÇK»AÄYuÀXx È/šÿ,2""g°<ÙÒÒÒßÑ÷Jää@"·sŠSiz/

.Šú«èØª4a¿5jŠ""/!·1«Ù.#?öÈØ©...æπ†œÍ(ÊØËÁÅ;wÉEÈ,Ë...

€ ·â

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

cKã

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(<sup>1</sup>Ü

lÓm3m³nqP

YàÓ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ô sEë-E/œXôz•@èpfĚé°

B, &+ä>š,à°[@ŽÇ:ùÙkn|eû+Û6PòòÒÂ5s÷P¶ö³Wíçö?²cÿgî>zĭ

¿ö7µ•=róJ¿Ý÷gĭ▯6

BB`m%÷ó\*▯ú«•,iW(ˆ¹,šX–/ÎÍPÈü‘A-Qì6äR–U<sup>23</sup>/<sub>4</sub>¹k|U×L+Zç

„h«@öüí–];O[´

ÛéÛĬ<™ÓF·g:€ĭ?7m»XG»Yæb§Øã©f·´Y▯Áý«Šž>×ì£Ãý•

mÚLX=ı4[XÖþEZQéCÎÑ6pÿ|¥¹–ö÷¿Rô´©L<sup>2</sup>õç=íGv<sup>23</sup>

&\_ÿTäuĚ–+´Mv9^2|óòíĚ¹â+„ùõR4W·|Uĭf³mo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⌘N`Ó“ôá\$ÃÈTê f!—:~⌘x±ôHës©Ô

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ú¶B÷D»^R/[¾B-ÕĬ-Q`R<Mă”@Q8ÅÊRíĭ®Ýμ/tyüñ)

ŠĐ²ÜëóáaZl2´dpÂj›ûàü%øBæ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k™YiâÁý”Àà,ç~@\*’L±9YhkŞêsxÜâÛs”«ü°wPî#É-

IRKâ~ß«øðê“ý vr£ýØÒ?d"eÄcýXÖÈÉ€4AÎ@iNê!

£èk'óÕX’xg:N%¹ Îx8Üž

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tAF<sup>TM</sup>^iï\_X>O“liQŠÉ,,©ŁóW¬¼&š6èòjW©çwŒç\$—®ßàò^—H

('ã!y «ss2“Š`äšñPóx3i|elŽ·í‘Ā<f=½=d´g¬‡±‡ôá:jwæúú'ÈªC

iom—&ð†;S©<Ĭ×alS<

<sup>TM</sup>éÓ·¼õâĤ+æ½2rykcÿ= °Vm+ °6X·©søø~ôÈ^1~Ñp,bù °

ÉŠúp,‘”Ê<sup>TM</sup>AA/€`4575568]·«ÓA<sup>TM</sup>—

s†iQ¶E¹Z V»,öJEĀÇĀjAýqi¥—Æ£,wfµnSãŠ,ïē^8ruM·Zm³C.ĩ

(~Ç—®Rýâç^J/i\*,s×w—f.5x´ê€Ç7cŠ¼¿Ā«Ÿ°fKw÷òY7—n;f´^K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[zñ®iCERX O•º/ĭ@a\$b¹Êê º¹äXÖäd¼³—äËL‡ÜæÈP2#^zO%

Kà#UJ—“U(‘A—%ĭð=.q• J`ÿÁâœ!>ù“bĭ ÈÈSÐD;2¼g

±ÈIN÷3Ü " ÅûMKâ>ãÛãĭ—



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

àú ŠçS€âduŠ3Xp&œ“âñ(:S,žAâ0í.ĭnÖn×-t 0RÆ,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

éÿy~P)]¤~H3ONº`°6YÅÀ7Yÿ(ÛvâÄà7eÈ`^Í¤Á-Å|~VjñšZDŠ3-1

+Ëí±@|Òék-vYÄ¼4ªÅÚçhÀ†~gÀ·5V,d,µ,Y"Á`PÆ

£ò~L,žLÊ'e•<~üÖ\$+>é#\$‡G“ §F|,^."±Ó@F†...U...

Q`oášØ«Âê

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"V<sub>i</sub>/pôÖæùHx¥Ãê"ÈÙĈEsc"R]

5nÊöã:iaöÿä'exS\$=yyiáâ8KÄÉ jý¾¼|Ê...;!Ú,,t9¿ TN#6£N

£bæ3@5`‡sZ•€yfp^xf'â¢L`ŸbUkìjµFÃñjÁ AA#6>f¿:...

ïUCE\*,h5, Qñÿ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



^z†\_©èμZ3†÷rù9ÂMà¿+¿yš÷™O™9³ ¨±ÚmzB‡1b·8Üâõ

YÃr¶Šo◁L¼.fE&\_◁Ó#-ç...¨Ú<^Ú4k6>AÈ±yx;Â-°%

TÀ`iØNGšŸ7|êÑRŸ½²~øe|â(wÛ¹É×|×Đé+¿Ã

€‘PSjoĐP¨»É†øè»QAàð-Ü6~>óNB‡!\*.ìN,N^

£Áš ÜqTŽáXìCE'ðçIH4S8d6bô4VP>AVó ZŸ-

(μfμûjOÖøμi\$ñä¥UÈ&Úd[Î|ØÆIûlj>;ù4T—àÜ@İöé·é\*ôLm¥<

‘u``j‡BjÂÖ

^1ú~øEμV¿/à#,%jCEEμáu8(z×j r]lôYâu¨Æt^J«½öVP7†°

ÃÄ©+Đ`fÂ-%o45b¶¶€`2q◁RMî;ûÆ5'±İßóòÆ>\_¾gí÷¾4

€í^3ý²u~WãÂ·;î¾4%¶Rμ)jôîjü%°Ÿ\_ìöÂ

JÓón,üÝÜi7zòŸ2@A`ñIXùP‡Ü|—ôE—ä»(/)pqÓ·9àt&Õê...

êo«E^Í`Ò-v'®Ñ¹PúýWM,ßÑ ÇôçéE×‡7šä ðÿp9Øİ»U^‡Ûévù

%μÖŸ—ôp¹⁄⁴⁄\$k·—Ü,,>n f[0rnc\$\*]ªm<Àø&E«Ui†6J&₃FÂ

ª<»Ÿx~¿,ŸæA;pÜ!L



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0PŠ Ÿ'Ä¶Æ¶Ù¶ÝÆÛ&°Z±)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





'eE•1AyĐ÷3ø€ F-(ö5d3ÜNv"çÈ+ ýpT~wð"è9Ý:Å¼ù>pB

SÓ€mÓÃ•~ýÔn~NúŠ>øp ê4€|FX`X`[ÜÿsS€0µiU.7ÁélîÔ:ì...

U>π:Ü4óµÖDf×ì=1æÜ)¼Ë|jĀpXÔýÊÃ¾™[ô ÌÄë®]

ÜâÁªÒGQ<?ôí[¿uÃð±^Û,ñëGJgZÄú:~:W>Mæ"îfù^ªh'ê¥àÆ&

„ñWCE,,³¬G8`Øe.ÇrCÜ>î'pİà #/ñxó.``Ya

€QİªLêÆ50c2\$äeÄi©iûçÕwkâSÔÇÒxĒ1"âé,³ÜİÖðPë7'†2÷û

Ô[¥\$"O'~íýµiWÁ3%•X1ZCEİNä2«âWÁ†2£ý

|I\_î—î\_U'ð#o\_~y#pzâ½^àSÂp,,ÆôjB58èU‡Âæ ×#

¿œ®õ'ÚÂKÂ\$V;jN\$fhÔ+ò~žœGñ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

yTž...ªÔli+

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V2ã²73™9™á2i,P<™ÖŠ™r·kl&f...0±B““š©ËLà›...Ö®—

~<•JμöL³kÅ1ĐÓÑw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8rÝ»^~P%Ž±

#ÖâĈĖâ<\$]>)š~%]±FñÁ%i@mAQo,UI,,...Ěŋ\*b &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ĭækòl'fS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pt+P

tv„š)Rŷj“š

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



æU¶wV%edø,¾XO~ú™ÆQ»7pÓ^ÿùèİÆ~ý£ú'öÂ¥pM, cYc/

ùLé†Ñ` :m    ^İ]KsÝ·ë¤İ¾N÷µÑ¾¾»mðäç·Oó\*€µ º#ÝUE'–UèÒ

%%·@š j+(°Öiw2kŽS/SÖİÄ4Ó¤²vóİÂÖ~äÄ?µZ,óTÚmŠÖD–

Üi(Ö²ÓieA»i35•...³iL¾¾    ÚEd¶bo8/i...

§–ç8ú`oÈÿ YøfzèFidB“    =0B;Sbx\*İPY,²\*ÙL'µa“–

B6Ã¤Y©²4    Še gh>Ò'HAC@Ö~<4 ~>Kpn\*“İpİß–ÚÁf÷g'³j

%;š%(ë–u¤–«–k–¥P«”±œmÖÍxĐ=Ä?V»/«žİlYFréeò)¤/ŸR:[â

%òâò•²kâmò^'W~BLýB>|±ÁíÖ€mžÃw¶ûpyAxLİšİÖ

,iœN9éC`~«cĐ9êÜiä,İ1'q¾¾—i`+‘ÉÓò©ù

j#Ó±½jē™šâpQ9Sé²"WUÁ+çžXŠ×Ä£1MRF). uTÆµ²

'Œ²`NÜU»0f86@Qjg^òÖÆWaFöjdAC³K.X2

„ÜÀiP@~Ø1ºèSpÇÖ%fYò€®f©3‡œP:éLFh]Ÿiè~ié]

ôfàù=ßpèuélÍ÷YÄÄ/â×ç—lúÑ    ÔÓ^poÖÊ „fé\*<GýŠÖİ Zo

(İ6–²±–%ç¶ŠæÊ2g™o£Æö6½&mvÚ@zÒ ”¶Ó'OdsžW!

öİñ...,fòó`èv



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2«ã,¼wçüS=37µ0HÒc½Ù·WUñB;f'S|X€wë½XAÔñ·†³Š°

ÊFöjZJGÊ²zÈü“éÕ6·ß÷±TY:y,,ôôÉlñ,,x|~ÙCE Úh7×à5

„'ù÷Xö,Ÿs<çœp¿ãViöã¼Ä°Ä,Æ°Æø7 Ø¼CŠKœÓ!

¹=|»wæ¹êh¹!X0è 8PrüÜÁ9®°\_Fúü¾⁄-A%Èdýã€²ÀÓx^

±÷Úö~S1nÜ6i;i;elf¾⁄wR6Ä4±0fûàuú4¥ÊâTÆ¶N+(+¤/Ê¥G±

¥äW^Mí

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cK\_Ü'©/zíµÆDhŽ%—é«ý|óšëpû¥ŸwMÿÿædbÝúÆ5ëÉ|óª±+”

¥ëóâÖx3zéQJñ!EDsŠV™UD\*m...5Z¼4W»4¯;Wo

£f|V:»Sõ¹èCEJRÈ7a”UÚ3™ööçÙ5“Uh¿

Ê¿S=iªañ€²LÇwe^;ilQÝDnRš,¶h†¤!÷—

Ú1il=.»öuÜö;öæÔ”ñô65ÝËÿ º%·7pwé'›,š@Ð+ýµÆôºBá¼

„Ö!âÅø|ÄÄn¥£pËi—\$Õ%·4gJÔhq\*`ô;À`v@ ”±XzcVb¶.±dÛe

+oâ)6XâÓ

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-äCE`kías,#1Š1licæ'ØÂÂ†]U,30Ò3ýA\*ĒI"c°§TMM

€'U|ÿiſÎNUyk^N©EM4OÆkãæ`^Eçæe6-fçEÒÕ!c.çlš'q

jëſ|°âİ8+ĒâÔ''^2V`~#ĂØ|&v™R+f |ž.Ē€ĒÔ,J•Efİ Møw/

Ůú½ÒôŽáp:Úo°ýRbt\_ì· úÔÎÒM/iYqâÁú\_Z'us-íæâT×''-

í»ă†ÿöççK“÷Ççøî+ŮB±X>z]iíœYçžýúìopÇU+¥¤

\$,¾ôHí"Š §@ŌP¥ç Já %•Ñè™ °ÖfbJCE(±ÁØ¾⁄⁄©³DbÓ

'mG»Ñ>¤BièÇêĒ¾⁄⁄SUMççcëób Gj"D ~¥Töýýp€—

l1sT“Ü.7B¼ežuØn,œÓ¹—xãˆ.VÑ±¹up9o“@egmí¶¼•®~Ēi

±!í4•ĂkçLÂDYý³Á`ÜüðÝ?\_÷ü×ĩ,7]Ēă"Ăă-y...yòĒ;xĒ

¥í PÚÿ~éèýŁÿpßKĩ, íĒwpñ±?

J''ôÀ•3Ă¬~="ØiPÚ"x\$)¹Ý...^©Ý†-ĂíH÷÷DE±¼⁄⁄òà@'AS¾⁄⁄⁄áŁ(&

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



@³%XŸÖjæß;ùBÅj2™K!gPnš7»]O“>]]

**P U T U S A N**

**Nomor 56/Pdt.G/2011/PAJP.**

€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

.\_¢!^..»U\*TJ.20111220104918\_6d8d78280445c624ab001033b7cb1f72\_123-2011-CTV-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.rtf.Q9pT9V»U\*”B20111220104918\_6d8d78280445c624ab001033b7cb1f72\_123-2011-  
CTV-B.rtfZ½Vâ! ḟÇJ ,,+ÀX\$0"Ø0Zα5û;»Rä/g«»8¶āØlā;â8l É...û²HànðÙ1%o\_%o  
İübÇ±˘wç»<llq'F°\_xðif'w Üh©îêîêªêªêžžfg¶<vÊ.;1¾l'”ÉÁâµÜ>g?’s=S]ªªêCy\_ú\$...ú...  
ßÁDÖ;%oÄjÂ=J^]ýŠúâØäÜÓg¹8 õiYiYóè;||ðµó±™Bp(ÿİyëY  
z®ó‡O Ü=®M‘ox³\*”—’á,,÷ð3,,Î#\*<»üvDl½>'ñúœÄ³º9Ö·Ý ù/o®Ó)pBÛ%o  
ÿP¾ÔQxé”=gÌgyâ m=âĒĀ×ð...CØéİ[[~ã;G÷>;¾iÆ\_ ôääOìüáY.¼4ðÖøÛãñ^ø%o K%í–  
ĂŠÛ9¶¶9¶||kæÎâ,âb>Íe>™YYlûzÁ%œe'rÔ,,ÂbE>ëÍk>ÑVà³;mwÆµ@yûfi)ØW,kÎµĀw|  
^qªj~ifÆ,fçð~ù–ž-îäüuâ<ÿ˘géoï,ý£.ÎúÓð7×#l̇>é‘ßç’Ä)uLp]â±–Ö)o,îºf3–Ö&αç³,zëËüç  
•ùømlĀ÷ù;cEY8óïø©£ßäs ü2/zóÓİEYX9ÇfûKßyêO\_ç;îBäpiü÷ãİð:˘Ê3?;pK˘  
‘GääôTªÇ;¥©<í-...©‡4p)®ðð~T’/ðš!Ž~ÖÛª®AİüwP  
2f»E¼ ˘Yéαç²î‡Áf1‡ý<Øyð\*Êœlð,ÖE⁻ÄYöH–sÍPiÒ9Ë’/Äçîâç±Žª¹¼÷K%  
~a>xkðÄz Ä"ħşgj²Žçç^Anv^YŎl³ãê

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

÷2%o'œ,—“Í3Kqÿ'VšŽÆ...†õ—ÛÊc6@\*œÛ2œ6‡Óé™[VWáär:'Sä6ÜÉØœ™%uâyœQä6ñ

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q<.iYöt%ÓYš...MÑipMëeãßô3Ã<É5Yë3yæÓÒ-³çlñx(E½UI<A7`pö`nÉPK>Ö·Š¼A/!;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(nGäiÇã<ÒIşpôâ±

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e^Û\*^X¶\*C<-T`J™Wdyİöð«øŠzñyn/>μH9¿îê÷ž±Íyĩ©Nõè#è

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±ik~ø=-xŽ8 ¾É×i=Á2YÔëù‘ý»rÜ~Ö@¼fàÿuÜiPLÇB:”Ãj(iÈT™ã~]p-rö]-  
€™~3Em`ð•ŽrÆè(&ëKCÖ9LC«Kü\$lf0ðœMö-ÇÈAüñfÄÿCàçKÇœýŽ»ðÃKVÚpðüW?  
¾fûçÍ³÷µ<wccēglžOoœ²Cİo~zš—4^;I·Mu:°†ØpKXô-hóý~ÿ¼#bþ,øÈ»@x~jSÖ2 çÿæ?š  
¿òİÓôÇèrÁžÿāš ¾/·áG±f~Eé7Ê'~QİüOçèÄ<á%œÿY,~ëÆ·²Öor6ð~)Ui»Ø—Åo`  
¥=Éî·½ÁjPb»¶kâÊ\_™ yYª<Èn>°Đ.è‘oB¾p\*  
çÜ Û\_µlV>‡ÑvÿiAYáðûšø2Úíçt´µnlÿd·þ<nCYäëe’æVpãÄ(ör“€“û8ð‘èàÿç¿“!lw †Ô©chl  
Tðõñ[ÜE÷(‘ä Öóâ÷eØ=ì¾~R^TÜ†Óóð¿ô÷i9žp°œWgÎÈl\$ó‡Y÷f #çÎœ?â†]kçøÈ¿u†s!wæ/  
fmšÔÎ(ü)Ñ[Á×?\_Ö6÷  
¥7hëÊñ~÷¿ù¥ó±#  
÷zZ<·z^¿;±âó<ÿ©<½\$¶tGÖÚªÿU÷UýwðÖñšİsc5—“Pjb+...i.Á/àYÍvÁiUÎ Ô)·Û  
œñµb ā”ªÖİ%•zâp‡ÄUv=ÿ-qíœçOc...ü&%œ\$fp°Äñqp%œ;~Gé“xû,,r—Ä¶rª...İd]ö—  
\$žÅzİN Äñ€ÄsØPÜJÉ8¼9wDâC×2%œ+İfZ!q•U»ÖJÜš€ÄÓX—ë ÄÓAÿ7.³.×Ç\$ř 3\*ñ

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ÖizWâNEİ["ñL¶lÆ'ä'n.ŸñœÄ³Ö=3U%çª,ë · «gÜAxšđHÁçOŞú~nşúQÂ,,Ÿ%  
<Cø"àG‡Ÿ—8lTø²ÄáfÂ7%m—8lT¶âðQ' \_âðQÑ Äáf9k\$ÍÑ%íuO%œĀGî‡%i!‡~ÄáfðE  
,,;Ä,Êo!<SÆŸüÓ,,gQýý,,çññt%œ±"Ÿ\$ldüð' ŸI4?!ñù%á³©pĀ<DßN± ©°t+h\*Ü,,» -  
\$lÑ×¾~ðfĀ—Š™QÑ.pé/q'U±OàYVýĀi,f~f±~f°!3rĐÁúoeaD%•†U5Ì"ÀEªŁPojè\_~%œēōŸ  
%§ēæfkGK€Ā'4&ē¶ ·ä-c«ð©aK%VKµè@¾z;C"zî?āH»AA»JÑÒ  
""Ó¶]=%œR»^v5V'ÁÑLŽ`94·ÁGcàä‡ž~ĉp%œ×āz!(Za‡TéÉçĀ^Ÿè\$ùP'8Ÿð¶ÖP  
+Fä‡&QØHØFCYDD%×ðfÆ¶Q yH^+Ò6Èî!>ë ý

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pVϣž,[Ö%t²ü†S?h‡.KeP°AÖª7)×/£v)ù%Ì°œÖ[©¥"G‡6K°G°·ÅOÚŽ4FZ[~°çï%bh#i%

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+l.ˆtfV\$ùÉöÝY"ÖB\$kr¼ø\$/t=fÄQèÝùAâhY\_#u`ç“P°Z,,Ö!ô‡Nc´ú%ýĩ—QB/  
=hmLŠ<kt éRÿlÓHÂdžŋâAâÝ7)m˜xY2õ—µ£Ö">©æ4°(xd?r<·OÖÄÈÒ"¢R1!!<ˆ¿DTø3  
(%\$øˆÿ€"ˆ—#µæžà²BÍa¢¬MÙÖ/—#ñ(EJ)ˆšYÖiÒ1ˆXSÍaXD[ø¥xˆµa¢ÖV—ö÷Ñj\$ÉY\$°Y7Éî  
¥Z«¿a~éÃ>šwý2FÂHÂÆÖŋ8¥VyleE‡F6ôÉñûÉk¢é\$!gEcˆzZ#™Yˆpdd%¢™ÿé™i#bs@Î-  
kÝ \$ôR)½2ŋ<®DæEäóIjÄ!F-iž>ˆú,,ecôûÓ%öPlk!ÛšwÑäzby]ènÍ÷ˆ¬ÜdÊ(KžVvk<¢³©  
¿¥µàë£ÖT¥YÖ»ÉZý4K†ˆ£HÈÑš)Úu²DDÊsÈ²bˆˆú4NpřšÖ°™ĐŠ®yQˆÆµ¹Åššˆˆ&ˆ°U  
ˆ:AÑGs),D2ˆd²-Ç«ˆˆˆÿ)b,ZcˆˆˆXé;p½2ßØˆÈxjÅˆÒQ3jÚˆŠØÜÆ+A3>TÛÁ²ÅˆU:(šİKÄš-  
¬æ%œÑ~iôTÆ~°«XÊ3%œ9ác.j.)Ó—¬xNj]&ˆ-ÖÊˆZGùë—k!)çt/q1ˆk¢ˆRšˆYr-İj^,™Ñ÷  
±LbÍL®N†œqF2!#ˆ~DâÍfˆñx)%fı°~1%œKjO—x-€"»heˆˆˆž Í—òP9j¥yzTL—  
œXÛÄ\*!ÓT‡ÔÊŋ)×ÊÉÖß%œšÔ:;4Í†ÜeLpsY«ˆNöˆˆeýr\$óAl®ÉX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MZÛrAJÒM-öO°ŠD&í'—\$©#“â6uí~ K í,Ä?Wá)üÉÿÈ>“÷;ı%ođ1E  
µC‘Âÿ¾äx,½&GwP@~—ýYŒ/ã#µòNı÷Q\*>¶DØ\$.±÷xCıD~ÑXû=y5t“”Û;ÅÙ  
ıYªØ‘tĒēĐıÜäYŒÿ÷~, \_Dıÿüò^çR», é~’~•Ú±ú^çôÿæđ~‘  
þ"mSVž.aēō~ªF†ÜÅFqıİp÷İ°·À¾ŽŒã^KC°

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ŸŸ,«<sup>a</sup>£+qJ°“µHÊ´.CKÄëqVO½V°«p/ @pÿË@u ý•1ÑV´ð´×ÃŽ¡~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

£G÷Ú×μŽ>Ck‡ÂQTiÃ‘bpDúÃ!¿à«Öšð”pg^³³=^%oSÛB¿e«VÕ,ER[¥5Ú o\_ÔÔv!0°#~÷=°  
ÃèðH,íjªÔdíê]FÄ–WÕÔh~\_ \$l†ç<^jr#U´vPvTë`èÝFPDÂ=ĩ«μlzyfÔ^Ýš?æEAº³]  
Û!G5ÖÑªμððTiz”[3!1Ø²\$‘Æ7ÜÑûû†&WZSDð‡zE\_?L»TÛîë~\_\_8 ›K÷^ßç×μv=êÆ`!•μÃ  
¡”°E†4S‡a\$ Öm”pßĐÍ²,T°ÁpÄDúbA=õ5\_ŸÑ~Ÿ%ccè!mCbü~~¼4l†i†!N

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hy~O6KVbđ±júfd†`8Ü-z

jGı^F5uÑA#õ ö%oE†\*4²txÀ`èðu4bèÑ šD\_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

þ6...0á=#B\*ðÄ ¢+ÄÄâÇÌ(ÕCEÉÉ-‘j)F\$èE\$lluèĩ<AâÀn¿Píƒ°¹Ögúa‘°Öë0^€B^×0‡4`»Br½

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zB€C>B,sû...±4ã#LD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

i>%oØ A €Ì•“È”òlèÑeh1!EÖ4Æ,,²1Ÿ°;ÖÆÁfŠFEœ`è~"4à&&fđD1`÷ê7úC`mDK,  
£ı·BièCB,,è2Í~½\*Fýİ,Èû#á~ ,UõE£ý««««,2`«lá`u\_4`FCzĐ`šüt1đ\*Qù;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ÔÔek[Ç-M[66vliÛªµmÒ>´ecóÖöfqóŽææÖæÛÎlgGİš°š0±ð ÅçdÑKL1Æd1æ@!m  
(="Ú`gšGVX"8(Fá\_L¿ÈõP^a^H-Ò:ÑOG,,»Ä4BİëeDtŠp2à8CX:bøç  
ðsi~ÒK,0Ük 18Û@AδvÅç`5Ã~Q~Tn&”B`M`i,çMS€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.\_ç!..¼U\*PG.20120214141900\_82c6f4e79506bb477499b2395c4a61ae\_514-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cggh-09.rtf.nKIIFj¼U\*~?20120214141900\_82c6f4e79506bb477499b2395c4a61ae\_514-

cggh-09.rtfT€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.\_ç!d..½U\*XN.20111122171657\_3abe19fd17057de210223e181f172290\_240-PTPTH-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS-2011.rtf.uVg9dH½U\*F20111122171657\_3abe19fd17057de210223e181f172290\_240

-PTPTH-PNS-2011.rtf1

**Rusdiyanto bin Suwarno (alm), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kayu manis VIII RT.014 RW. 008 No. 05 kelurahan Kayu Manis, kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----**

**Pengadilan Agama tersebut di atas ; -----**

**Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-----**

**Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan ; -----**

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama é€\***

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

.\_ç!...RV\*PE.20120214220938\_d9fa37355fdfba8afa2677f7864b969b\_278-07-

GH.rtf.FyOfAWRV\*~=20120214220938\_d9fa37355fdfba8afa2677f7864b969b\_27

8-07-GH.rtfê€\*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.\_ç!..SV\*PG.20120530091254\_35f4f8238a45da53e512d724c938c2c7\_560-

cggh-07.rtf.ay5QevSV\*~?

20120530091254\_35f4f8238a45da53e512d724c938c2c7\_560-cggh-07.rtfë€\*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.\_c!d..TV\*XO.20120404102133\_11b543b70293648acb698018dc8a1e7d\_602-09-

G-luar

hadir.rtf.59B8V3TV\*G20120404102133\_11b543b70293648acb698018dc8a1e7d

\_602-09-G-luar

hadir.rtfi€\*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

.\_ç!...UV\*PE.20120305102517\_d7be7d7f26998816a391135aa8854ab1\_210-10-  
GH.rtf.AuOhGCUV\*~=20120305102517\_d7be7d7f26998816a391135aa8854ab1\_  
210-10-GH.rtfi€\*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

.\_ç!...VV\*PF.20120228102736\_ce03f9859b768a2343df163f98a11ce2\_092-08-

GTH.rtf.POhTtbVV\*~>20120228102736\_ce03f9859b768a2343df163f98a11ce2\_0

92-08-GTH.rtfi€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

..\_c!`..WV\*TJ.20120215094705\_8ea640092e8b476c5f131603846d2e89\_75-10-

Gugur-

C1.rtf.cJwCkKWV\*\*B20120215094705\_8ea640092e8b476c5f131603846d2e89\_

75-10-Gugur-C1.rtfi€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.\_ç!...XV\*PF.20120416110432\_ddc8f079e9cebc7109ac3dacbddcc684\_715-06-

GTH.rtf.ZcHidjXV\*~>20120416110432\_ddc8f079e9cebc7109ac3dacbddcc684\_7

15-06-GTH.rtfö€\*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. \_c!X..YV\*LD.20120502093249\_81d3c7be4a993ea64a5fffa680788264\_577-08-  
H.rtf.0uxq9RYV\*œ<20120502093249\_81d3c7be4a993ea64a5fffa680788264\_57  
7-08-H.rtfBahwa saksi pernah melihat dan membenarkan bukti P.1 bukanlah  
yang saksi kirim ke klien saksi yang ada di Inggris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya  
masing-masing tertanggal 3 Desember 2014 dan para pihak mengatakan sudah  
tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali memohon putusan;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka  
segala hal ikhwal yang termuat didalam Berita Acara persidangan ini hendaklah  
dianggap turut termuat dan dipertimbangkan didalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana  
tersebut diatas ;

### Dalam Konpensasi

### Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat  
II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

#### 1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa, jika dicermati secara seksama, maka pihak yang menjadi pihak Tergugat  
dalam perkara a quo adalah para advokat yang menjadi kuasa Hukum dari **PT.**



**Bali Resort & Leisure Company** pada saat PT. Bali Resort & Leisure Company yang digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps. Demikian pula para advokat yang mewakili Penggugat dalam gugatan a quo juga merupakan para advokat yang mewakili para Penggugat dalam perkara tersebut sebagaimana juga didalihkan dalam gugatan Penggugat. Maka jika gugatan dimaksud ditujukan kepada para kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company dalam perkara tersebut karena dialihkan Penggugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum saat menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company, maka yang menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut bukan hanya para Tergugat saja melainkan masih Terdapat rekan **DEWA ALIT SUNARYA, SH.,** yang juga saat itu sah menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company. Sehingga tidak diikuti sertakanya rekan **DEWA ALIT SUNARYA, SH.,** sebagai Tergugat telah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak.

#### **1. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libellum )**

Bahwa, kemudian jika kita cermati gugatan Penggugat lebih seksama lagi khususnya pada bagian Petitum gugatan Penggugat pada petitum angka **angka 2**

( **kedua** ) dinyatakan sebagai berikut :

**“ Menyatakan sah dan berharga dan meletakan sita jaminan atas seluruh harta bergerak milik Para Tergugat “.**

Sedangkan didalam petitum **angka ke- 7 ( ketujuh )** dinyatakan :



***“ Menyatakan Sita Jaminan atas seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga “.***

Tentu diantara kedua isi Petitum tersebut sangat jauh berbeda isi, substansi maupun konsekuensi hukumnya. Karena kedua isi Petitum gugatan Penggugat tersebut tidak sinkron, tidak jelas, kabur dan membingungkan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat juga menjadi tidak jelas dan kabur ( **Obscuur Libellum** ).

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat, pihak Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan:

**Tentang Gugatan kurang Pihak ;**

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi para Tergugat karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang memang secara jelas dan nyata telah dilakukan para Tergugat saja ( bukannya pihak-pihak lain sebagaimana didalilkan para Tergugat ) yang dalam hal ini melanggar ketentuan hukum pasal 1 angka 12 dan pasal 19 Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ; Bahwa kewenangan menarik pihak dalam perkara adalah kewenangan sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa saja yang dijadikan subyek gugatan hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 Jo.Putusan No.3909/Pdt/1994 tanggal 7 Mei 1997 ;

**Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libellum )**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas ( *obscur libellum* ) karena jika dicermati dalam posita gugatan Penggugat ( angka 14 Posita gugatan ) telah secara jelas menyebutkan permohonan kepada pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat sehingga dalil para Tergugat yang menyatakan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan pertimbangan Eksepsi para Tergugat sebagai berikut :

### **Ad. 1 Gugatan Penggugat kurang pihak**

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan Perdata maksud dan tujuan dilakukannya gugatan terhadap pihak-pihak yang ada kaitannya dengan perkara adalah agar penyelesaian sengketa dalam perkara tersebut dapat secara menyeluruh ( *komprehensif* ) diantara pihak-pihak yang berkepentingan , bilamana masih ada pihak lain yang ada kaitannya dengan pokok perkara tidak ditarik sebagai pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat maka gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya ( *vide Putusan Mahkamah Agung RI No.186/R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984* ) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* pihak yang digugat selaku para Tergugat adalah para Advokat/Kuasa Hukum, yang dahulu dalam perkara perdata No. *No.733/Pdt.G/2013/PN.Dps....* sebagai Team Kuasa Hukum dari PT.Bali Resort & Leisure selaku Tergugat ; Bahwa Team Kuasa Hukum dalam perkara No *No.733/Pdt.G/2013/PN.Dps.* tersebut terdiri dari 5 ( lima ) orang yaitu para Tergugat dan saksi Dewa Alit



Sunarya, SH. (sesuai Surat Kuasa . Tertanggal 25 November 2013 ) namun dalam perkara aquo saksi. *Dewa Alit Sunarya, SH.*, sebagai salah satu anggota Team Kuasa Hukum dalam perkara No. *No.733/Pdt.G/2013/PN.Dps.*) tersebut tidak ikut ditarik sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun untuk menentukan siapa saja pihak yang digugat merupakan wewenang Penggugat, namun dalam perkara aquo para Tergugat adalah selaku Kuasa Hukum PT.Bali Resort & Leisure dalam perkara No. *No.733/Pdt.G/2013/PN.Dps* dimana dalam bertindak senantiasa untuk kepentingan hukum PT.Bali Resort & Leisure dan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara aquo ada keterkaitan dengan permasalahan kesepakatan perdamaian dalam perkara Perdata No. *No.733/Pdt.G/2013/PN.Dps.* dimana dalam perkara tersebut PT.Bali Resort & Leisure sebagai pihak Tergugat maka dengan demikian secara hukum seharusnya pihak PT.Bali Resort & Leisure ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo namun kenyataannya tidak digugat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya ;

#### **Ad.2 Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libellum )**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati petitum gugatan Penggugat ternyata pada petitum point 2 Penggugat mohon Sita Jaminan atas barang bergerak milik para Tergugat dan pada poin 7 Penggugat juga mohon Sita Jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci spesifikasi barang apa dari harta bergerak dan tidak bergerak milik para Tergugat yang dimohonkan Sita Jaminan, bahwa Penggugat hanya secara umum menjelaskan barang yang dimohonkan sita jaminan yaitu berupa barang bergerak dan tidak bergerak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para Tergugat, maka dengan demikian menurut Majelis gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libellum) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Eksepsi para Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi para Tergugat dikabulkan maka tentang Pokok Perkara dan gugatan Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipihak yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MANGADILI :

### Tentang Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;

### Dalam Konpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

### Dalam Konpensi/Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 oleh kami Dr MADE SUWEDA,SH.MH. selaku Ketua Majelis, DANIEL PRATU, SH. DAN I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 29 Desember 2014 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu NI WAYAN ARWATI, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

**Para Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

t.t.d

t.t.d

**1.DANIEL PRATU,SH**

**Dr.MADE SUWEDA,SH.MH**

t.t.d

**2.I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH**

Panitera Pengganti

t.t.d

**NI WAYAN ARWATI,SH.**

## **Perincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 2. 915.000,-
- Redaksi.....Rp. 5000,-
- Meterai.....Rp. 6000,-

---

Jumlah.....Rp. 3.016.000,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.260/Pdt.G/2014/PN Dps telah lewat sehingga putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Januari 2014;

Panitera Pengganti

**NI WAYAN ARWATI,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)